Ringkasan Eksekutif

Laporan Tahunan 2024

Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif
LAPORAN TAHUNAN 2024

Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI

H. Suharto, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
(Dilantik tanggal 6 Agustus 2024)

Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
(Dilantik tanggal 6 Agustus 2024)

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
(Dilantik tanggal 12 Agustus 2024)

Daftar Isi

9 Penjelasan Tema

10 Bab 1
Manajemen Perkara

10 Program Pembaruan
14 Keadaan Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
22 Kinerja Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik
23 Akseptabilitas Putusan Pengadilan
24 Pelaksanaan Putusan Pengadilan
25 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi
26 Penanganan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Perkara Perdata ke Luar Negeri
28 Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara
29 Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara

31 Bab 2
Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

31 Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung
33 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

36 Bab 3
Manajemen Sumber Daya Manusia

36 Program Pembaruan
36 Rekrutmen Sumber Daya Manusia
37 Komposisi Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan
38 Pengembangan Sumber Daya Manusia
39 Promosi dan Mutasi

41 Bab 4
Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

41 Program Pembaruan
42 Manajemen Keuangan
48 Manajemen Aset
51 Manajemen Teknologi Informasi

54 Bab 5
Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

54 Program Pembaruan
55 Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Kebijakan
56 Advokasi Kebijakan dan Publikasi
57 Putusan Penting (*Landmark Decision*)

64 Bab 6
Pengawasan

64 Program Pembaruan
64 Penguatan Sistem Pengawasan
67 Pengelolaan Sistem Pengawasan
74 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

75 Bab 7
Peran Serta dan Kerja Sama

75 Kerja Sama Multilateral
76 Kerja Sama Yudisial Bilateral
77 Kerjasama Nasional
79 Penyelenggaraan Acara Internasional
79 Kerja Sama dengan Mitra Pembangunan
81 Partisipasi pada Forum Internasional

Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas

Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 ini, tema "Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas" hadir untuk menegaskan bahwa tegaknya keadilan tidak lepas dari keteguhan moral dan komitmen bersama. Desain sampul yang menampilkan palu hakim berdiri kokoh di atas batu karang, dikelilingi gulungan ombak, dan disinari cahaya matahari menjadi simbol harapan akan hadirnya keadilan yang kuat dan terang. Dalam tema ini, terkandung makna bersyarat bahwa peradilan berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap orang yang terlibat di dalamnya menanamkan integritas sebagai landasan—keselarasan antara perkataan dan perbuatan dalam koridor kebenaran. Layanan peradilan yang prima tentu diukur dari capaian kuantitatif dalam manajemen perkara. Namun, yang tak kalah penting adalah menghadirkan rasa keadilan yang hakiki dalam setiap putusan pengadilan agar masyarakat benar-benar merasakan pelindungan hukum yang adil dan bermartabat.

Bab 1
Manajemen Perkara

Program Pembaruan

Tahun 2024 merupakan periode akhir dari fase lima tahun ketiga dalam peta jalan (*road map*) pembaruan peradilan 2010-2035. Para periode ini, agenda pembaruan fungsi teknis masih diarahkan pada penguatan sistem kamar dan upaya pembatasan kasasi pada Mahkamah Agung, sedangkan arah pembaruan manajemen perkara merupakan keberanjakan dari modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik menuju transformasi digital pelayanan hukum terintegrasi.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini:

Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif yang menyelaraskan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa telah menjadi paradigma baru dalam sistem pemidanaan. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan. Mahkamah Agung merespons dinamika hukum tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241 tanggal 7 Mei 2024 dan terdiri atas 3 Bab, 23 pasal, dan 37 ayat.

Beberapa pengaturan penting dalam Perma tersebut yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai berikut:

a. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
b. Penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.
c. Hakim harus mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusannya apabila dalam mengadili perkara pidana menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Penyempurnaan Aturan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengalami beberapa perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Perubahan regulasi ini berpengaruh pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 yang secara substantif merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Materi muatan pokok Perma Nomor 2 Tahun 2024 berkaitan dengan perubahan prosedur pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, antara lain sebagai berikut:

a. Penambahan satu ayat sebagai norma baru pada Pasal 30 Perma 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan berakhirnya masa tugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Apabila keadaan tersebut terjadi, pengambilan ganti rugi dari kepaniteraan pengadilan disertai surat pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala BPN Kabupaten/Kota.
b. Peniadaan kewajiban menyertakan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pengambilan ganti kerugian oleh pihak yang berhak di pengadilan negeri untuk beberapa kondisi objek pengadaan tanah, sebagai berikut:

Kondisi Objek Pengadaan Tanah	Syarat Pengambilan Ganti Kerugian
Sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketaan	Setelah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian
Diletakan sita oleh pejabat yang berwenang	Setelah sita diangkat
Menjadi jaminan di bank	Setalah adanya persetujuan dari pihak bank

Pengaturan tentang Prosedur Pemeriksaan Saksi/Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia

Untuk menindaklanjuti ketentuan pemeriksaan saksi/ahli pada Kantor Perwakilan RI, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 – 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler secara sirkuler pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024.

Beberapa ketentuan penting dalam Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang Warga Negeri Indonesia maupun Warga Negara Asing.
b. Pengadilan di Indonesia harus menyampaikan permohonan pemeriksaan saksi/ahli pada kantor perwakilan kepada Kementerian Luar Negeri/Kantor Perwakilan melalui Panitera Mahkamah Agung dengan menggunakan formulir yang ditentukan. Kantor Perwakilan akan memberikan jawaban tertulis setalah memeriksa aturan hukum negara setempat. Apabila Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan dari Pengadilan Indonesia, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang diusulkan oleh pengadilan Indonesia.
c. Dalam hal saksi/ahli yang akan diperiksa merupakan warga negara asing, maka pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli. Penerjemah lisan tersebut dapat hadir di pengadilan atau Perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia. biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan dibebankan kepada pihak berperkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Penyempurnaan Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, Mahkamah Agung memberikan legalitas dan standardisasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai elektronik untuk perkara yang disidangkan secara konvensional. SEMA ini merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Eks Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Transformasi digital ini merupakan bentuk upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektifitas dan efisiensi serta peningkatan layanan. Kebijakan ini juga merupakan upaya memperkuat ekosistem layanan peradilan elektronik.

Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan yang ke 13 pada tanggal 5 s.d 7 November 2024 yang menghasilkan 33 rumusan hukum dari 5 (lima) kamar teknis perkara. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024. Dari 33 (tiga puluh tiga) rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 6 (enam) rumusan hukum merupakan penyempurnaan dari kesepakatan kamar sebelumnya. Sepanjang 13 (tiga belas) penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan telah dihasilkan sebanyak 552 rumusan hukum.

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pembaruan Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara Dari Pengadilan Indonesia Ke Pengadilan Asing

Mahkamah Agung memperbaharui prosedur penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dengan mewajibkan penyertaan dokumen elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di seluruh Indonesia. Pembaruan prosedur tersebut sebagai tidak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dan Perjanjian Kerja Sama yang menjadi turunannya, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas monitoring proses penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing.

Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Kebijakan tersebut dimuat dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2022.

Hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.379 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 6.277 perkara (98,40%). Jumlah perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 102 perkara. Perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.837 perkara.

Selain memberikan dampak efisiensi anggaran dengan terhapusnya biaya pengiriman berkas ke pengadilan pengaju, digitalisasi penanganan perkara upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dengan asumsi beban perkara per tahun sebanyak 28.000, potensi pengurangan konsumsi kertas dari kebijakan ini dapat mencapai 42 ton per tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata jumlah lembar per berkas (bundel A dan bundel B) sebanyak 150 lembar dikali 28.000 menghasilkan angka 4.200.000 lebar. Untuk kebutuhan dua hakim anggota jumlahnya menjadi 8,4 juta lembar atau 16.800 rim kertas, atau setara dengan 42 ton.

Situs web *conservatree.org* menyebutkan untuk memproduksi 1 ton kertas memerlukan 12 pohon dan setiap produksi 1 lembar kertas memerlukan 13,5 liter air. Berdasarkan data ini digitalisasi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali, dalam setiap tahunnya berpotensi menyelamatkan 504 pohon dan 113.400.000 liter air.

Standardisasi Pengelolaan Berkas Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/ Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Juklak tersebut dituangkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Penerbitan Juklak ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik yang memberikan kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis.

Penerbitan Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kembali Penetapan Kompensasi (PKK)

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 1636A/PAN/HK2.7/ SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang mengatur prosedur administrasi penanganan permohonan penetapan kembali terhadap penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan Panitera Mahkamah Agung ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Kamar TUN Nomor 01/KMA.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkuatan Hukum Tetap.

Penguatan Instrumen Pendukung untuk Menjaga Konsistensi Putusan

Peningkatan kapasitas sistem dan konten basis data putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi, Direktori

Putusan telah mengoleksi lebih dari 9 juta putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui berbagai perangkat elektronik. Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan sistem pencarian yang mempermudah hakim menemukan putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Dengan putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi.

Jumlah putusan yang tersedia pada Direktori putusan per 31 Desember 2024 sebanyak 9.382.440 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 951.750 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2024 sebanyak 79.313 putusan.

Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Rumusan Kamar

Kepaniteraan MA kembali membuat inovasi yang memungkinkan publik mengakses rumusan kamar dari gawainya masing-masing. Aplikasi ini diberinama "DIKTUM" yang merupakan kependekan dari Direktori Rumusan Hukum. Diktum secara resmi diluncurkan pada saat peringatan ulang tahun Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2024. Aplikasi Diktum tersedia di Playstore mupun Appstore.

Diktum adalah aplikasi berbasis pencari yang terhubung dengan Direktori Putusan. Untuk mencari rumusan hukum, pengguna menuliskan kata kunci yang akan dicari pada kolom pencarian. DIKTUM akan menampilkan informasi yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

Keadaan Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2024

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024

Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	%
Mahkamah Agung	147	30.991	31.138	30.908	0	230	99,26%
Pengadilan Tk Banding	2.891	30.217	33.108	29.807	30	3.271	90,12%
Pengadilan Tk Pertama	63.932	2.927.815	2.991.747	2.856.821	61.804	73.122	97,56%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	77.425	3.003.665	3.081.090	2.934.589	61.834	84.667	97,25%

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Berkurangnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

Data Keadaan Perkara

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produk-tivitas
1	Pidana	0	2.007	2.007	2.007	0	100,00%
2	Pidana Khusus	11	10.284	10.295	10.290	5	99,95%
3	Perdata	90	8.202	8.292	8.211	81	99,02%
4	Perdata Khusus	4	1.415	1.419	1.410	9	99,37%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.157	1.157	1.157	0	100,00%
6	Pidana Militer	0	447	447	447	0	100,00%
7	Tata Usaha Negara	42	7.479	7.521	7.386	135	98,21%
	Jumlah	147	30.991	31.138	30.908	230	99,26%

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
A	*Perkara*					
1	Kasasi	65	20.370	20.435	20.317	118
2	Peninjauan Kembali	40	4.097	4.137	4.048	89
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15
4	Grasi	0	67	67	66	1
5	Hak Uji Materiel (PPU)	3	57	60	53	7
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	5	5	5	0
8	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
	Jumlah	147	30.991	31.138	30.908	230
C	*NonPerkara*					
	Permohonan Fatwa	0	35	35	35	0

Rasio Produktivitas Memutus

Perkara yang diputus meningkat 12,95% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 27.365 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,26%. Capaian ini berada 29,26% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%.

Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*)

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Pidana	2.007	2.131	106,18%
2	Pidana Khusus	10.284	10.479	101,90%
3	Perdata	8.202	7.880	96,07%
4	Perdata Khusus	1.415	1.421	100,42%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.157	1.122	96,97%
6	Pidana Militer	447	456	102,01%
7	Tata Usaha Negara	7.479	7.673	102,59%
	Jumlah	**30.991**	**31.162**	**100,55%**

Rerata Waktu Memutus

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Pidana	2.002	3	1	1	0	2.007
2	Pidana Khusus	10.238	50	2	0	0	10.290
3	Perdata	8.101	91	17	0	2	8.211
4	Perdata Khusus	1.376	31	2	1	0	1.410
5	Perdata Agama/Jinayah	1.150	4	3	0	0	1.157
6	Pidana Militer	445	2	0	0	0	447
7	Tata Usaha Negara	7.341	41	3	0	1	7.386
Jumlah		**30.653**	**222**	**28**	**2**	**3**	**30.908**
%		**99,17%**	**0,72%**	**0,09%**	**0,01%**	**0,01%**	

Rerata Waktu Minutasi

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.021	39	23	29	19	2.131
2	Pidana Khusus	10.105	166	65	88	55	10.479
3	Perdata	7.344	450	84	2	0	7.880
4	Perdata Khusus	1.392	27	2	0	0	1.421
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	0	0	0	0	1.122
6	Pidana Militer	452	2	2	0	0	456
7	Tata Usaha Negara	7.634	26	8	5	0	7.673
Jumlah		**30.070**	**710**	**184**	**124**	**74**	**31.162**
%		**96,50%**	**2,28%**	**0,59%**	**0,40%**	**0,24%**	

Perkara Belum Minutasi

Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1	Pidana	156	62	39,74%	94	60,26%
2	Pidana Khusus	1.179	344	29,18%	835	70,82%
3	Perdata	2.061	60	2,91%	2.001	97,09%
4	Perdata Khusus	90	11	12,22%	79	87,78%
5	Perdata Agama	225	0	0,00%	225	100,00%
6	Pidana Militer	12	0	0,00%	12	100,00%
7	Tata Usaha Negara	1.177	6	0,51%	1.171	99,49%
	Jumlah	4.900	483	9,86%	4.417	90,14%

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2024

No	Kategori	Tahun 2023	Tahun 2024	Perbandingan 2023-2024
1	Belum Putus	147	230	56,46%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	4.591	4.900	6,73%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
	Jumlah	4.738	**5.130**	**8,27%**
4	Perkara aktif yang berkategori tunggakan	**560**	**483**	**-13,75%**
5	Persentase tunggakan dalam perkara aktif	**11,82%**	**9,42%**	**-20,34%**

Rekapitulasi Amar Putusan

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Pidana	170	1.396	207	14	0	1.787
2	Pidana Khusus	558	3.855	3.865	27	3	8.308
3	Perdata	770	5.152	853	10	23	6.808
4	Perdata Khusus	229	799	307	4	1	1.340
5	Perdata Agama/Jinayah	166	585	151	31	4	937
6	Pidana Militer	16	295	65	27	0	403
7	Tata Usaha Negara	202	513	11	8	0	734
Jumlah		**2.111**	**12.595**	**5.459**	**121**	**31**	**20.317**
%		**10,39%**	**61,99%**	**26,87%**	**0,60%**	**0,15%**	

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Pidana	26	174	0	0	0	0	200
2	Pidana Khusus	765	1.172	0	2	0	0	1.939
3	Perdata	140	1.250	0	8	5	0	1.403
4	Perdata Khusus	11	59	0	0	0	0	70
5	Perdata Agama/Jinayah	26	171	1	21	1	0	220
6	Pidana Militer	3	38	0	1	0	0	42
7	Tata Usaha Negara	24	139	2	10	0	0	175
8	Pajak	674	5.642	4	98	0	1	6.419
Jumlah		1.669	**8.645**	**7**	**140**	**6**	**1**	10.468
%		**15,94%**	**82,59%**	**0,07%**	**1,34%**	**0,06%**	0,01%	

Pemohon Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2024

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	334	18,69%	2.925	35,20%	199	49,38%	
2.	Jaksa/Oditur	1.060	59,32%	3.161	38,04%	192	47,64%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/ Oditur	393	21,99%	2.205	26,54%	12	2,98%	
	Jumlah	**1.787**		**8.291**		**403**		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

1) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 30.653 dari 30.908 perkara atau 99,17%. Ketepatan waktu memutus tersebut **meningkat 0,28%** dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 98,89 %.
2) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 30.070 dari 31.162 perkara (96,50%). Ketepatan waktu minutasi itu meningkat 6,18% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 90,32 % (25.672 perkara).
3) Tunggakan inutasi perkara dalam perkara aktif dapat direduksi sebesar 20.34% dari tunggakan akhir tahun 2023 sebesar 11,82% (560 perkara) menjadi sebesar 9,42% (483 perkara) pada akhir tahun 2024
4) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,55 %.

Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Grasi

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2024	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	21	21	21	0	100%
Pidana Khusus	0	44	44	43	1	97,73%
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	**0**	**67**	**67**	**66**	**0**	**98,51%**

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	1	14	15	12	3
2	Peraturan Daerah	1	10	11	8	3
3	Peraturan Pemerintah	1	10	11	10	1
4	Peraturan KPU	0	9	9	9	0
5	Pelanggaran Administrasi Pemilu	0	5	5	5	0
6	Peraturan Presiden	0	3	3	3	0
7	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0
8	Keputusan Ambudsman	0	1	1	1	0
9	Keputusan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
10	Keputusan KPU	0	1	1	1	0
11	Peraturan Bupati	0	1	1	1	0
12	Peraturan Dewas KPK	0	1	1	1	0
13	Peraturan Direksi	0	1	1	1	0
14	Peraturan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
15	Peraturan Kejaksaan Agung	0	1	1	1	0
16	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
	Jumlah	**3**	**62**	**65**	**58**	**7**

Permohonan Fatwa

No	Lembaga	Jumlah
1	Kejaksaan Republik Indonesia	9
2	Pemerintah Provinsi	6
3	MPR/DPR/DPD	5
4	Bawaslu	4
5	Kementerian	3
6	KPK	2
7	Kepolisian	2
8	PLN	2
9	Ombudsman RI	1
10	Bank Pemerintah	1
	Jumlah	35

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.527	25.938	28.465	25.369	0	3.096	89,12%
Peradilan Agama	28	2.640	2.668	2.641	4	23	99,14%
Peradilan Militer	42	426	468	409	16	43	90,81%
Peradilan TUN	294	1.213	1.507	1.388	10	109	92,77%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	**13.346**	**44.859**	**58.205**	**46.860**	**30**	**11.315**	**80,56%**

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2024	% Penyelesaian
Peradilan Umum	40.736	2.328.328	2.369.064	2.320.770	6.017	42.277	98,22%
Peradilan Agama	22.144	594.715	616.859	531.605	55.272	29.982	95,14%
Peradilan Militer	226	2.478	2.704	2.502	11	191	92,94%
Peradilan TUN	826	2.294	3.120	1.944	504	672	78,46%
Jumlah	**63.932**	**2.927.815**	**2.991.747**	**2.856.821**	**61.804**	**73.122**	**97,56%**

Kinerja Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik

Layanan Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi/ Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024. Pengadilan pertama yang mengajukan upaya hukum kasasi secara elektronik adalah Pengadilan Negeri Subang atas perkara nomor 3/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng.

Selama periode 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2024, Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 13.482 pengajuan kasasi/PK secara elektronik.

Layanan Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN pada Pengadilan Tingkat Pertama Secara Elektronik

Tabel Perkembangan Perkara e-Court Periode 2021-2024

No	Badan Peradilan	2021	2022	2023	2024	% kenaikan
1	Pengadilan Negeri	90.041	102.654	125.660	127.661	1,59%
2	Pengadilan Agama	132.869	177.769	185.629	280.806	51,27%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	2.162	2.760	2.658	2.287	-13,96%
Jumlah		225.071	283.183	313.947	410.754	30,84%

Layanan Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Lingkungan Peradilan	Sisa Lalu	Jumlah Perkara e-Court Banding yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court Banding yang telah diputus	Sisa Perkara
1	Peradilan Umum	1.519	8.038	7.427	2.130
2	Peradilan Agama	295	1.659	1.439	515
3	Peradilan Tata Usaha Negara	540	1.067	1.300	307
Jumlah		**2.354**	**10.764**	**10.166**	**2.952**

Pengguna Layanan e-Court

No	Jenis Pengguna	sampai 2023	2024	Jumlah
1	Pengguna Terdaftar	227.126	57.781	284.907
2	Pengguna lainnya	440.999	222.908	663.907
Jumlah		668.125	280.689	948.814

Akseptabilitas Putusan Pengadilan

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tingkat Pertama	40.464	122.282	426.379	483	2.247	1.838	593.693
Jumlah Perkara Banding	8.701	17.237	2.576	64	426	1.213	30.217
Rasio Upaya Hukum Banding	21,50%	14,10%	0,60%	13,25%	18,96%	66,00%	5,09%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tingkat Pertama	78,50%	85,90%	99,40%	86,75%	81,04%	34,00%	94,91%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding	2.698	8.201	17.168	2.577	64	409	1.388	32505
Jumlah permohonan kasasi	1345	6760	10096	899	38	403	829	20370
Rasio Upaya Hukum Kasasi	49,85%	82,43%	58,81%	34,89%	59,38%	98,53%	59,73%	62,67%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Khusus dan Banding	50,15%	17,57%	41,19%	65,11%	40,63%	1,47%	40,27%	37,33%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1340	6808	1787	8309	1116	403	734	20497
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	58	1163	106	515	149	37	102	2130
Rasio Upaya Hukum Peninjauan Kembali	4,33%	17,08%	5,93%	6,20%	13,35%	9,18%	13,90%	10,39%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	95,67%	82,92%	94,07%	93,80%	86,65%	90,82%	86,10%	89,61%

Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2024

No	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Pidana	199	4	106	19	70
2	Pidana Khusus	1.931	19	515	163	1.234
3	Perdata	1.442	71	1.163	128	80
4	Perdata Khusus	70	1	58	-	11
5	Perdata Agama	219	8	148	15	48
6	Jinayah	1	-	1		-
7	Pidana Militer	42	1	37	1	3
8	Tata Usaha Negara	193	20	102	67	4
	Jumlah	4.097	124	2.130	393	1.450
	Persentase		3,03%	51,99%	18,45%	35,39%
	Pajak	6.395	47	0	6.348	0
Jumlah		10.492	171	2.130	6.741	1.450

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Sepanjang tahun 2024, pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan

No	Lingkungan Peradilan	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Permo- honan Eksekusi	Beban Eksekusi	Pelak- sanaan Eksekusi	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Kinerja
1	Peradilan Umum	11.441	3.540	14.981	10.115	4.866	67,52%
2	Peradilan Agama	86	567	653	320	333	49,00%
3	Peradilan TUN	109	164	273	128	145	46,89%
	Jumlah	11.636	4.271	15.907	10.563	5.344	66,40%

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2024

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	44.184	1.802	17.606	23.438	1.338
			4,08%	39,85%	53,05%	3,03%
2	Pengadilan Agama	58.969	27.750	28.207	1.433	1.579
			47,06%	47,83%	2,43%	2,68%
Jumlah		**103.153**	**29.552**	**45.813**	**24.871**	**2.917**
Persentase			**28,65%**	**44,41%**	**24,11%**	2,83%

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	5178	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%	93	65,49%
2022	5533	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%	5	7,46%
2023	5190	657	12,66%	464	70,62%	189	28,77%	4	0,61%
2024	4960	996	20,08%	424	42,57%	173	17,37%	399	40,06%

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah.

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2022	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%
2023	38	38	100%	1	2,63%	37	97,37%	0	0%
2024	33	33	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Penanganan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Perkara Perdata ke Luar Negeri

No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	45	462	233	685	46
2	Pengadilan Agama	54	144	78	222	30
Jumlah		**99**	**606**	**311**	**907**	

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan adalah sebagai berikut.

No	Negara	Peradilan Agama	Peradilan Umum	Jumlah
1	Singapore	39	177	216
2	Malaysia	63	59	122
3	United States Of America	17	49	66
4	China	1	61	62
5	Australia	12	41	53
6	Hong Kong		32	32
7	Netherlands, The	5	22	27
8	Philippines, The	4	19	23
9	South Korea	2	21	23
10	Germany	7	15	22
11	Japan	1	21	22
12	Virgin Islands (British)		22	22
13	Taiwan	15	6	21
14	United Kingdom	9	8	17
15	United Arab Emirates	2	13	15
16	India	2	13	15
17	Russian Federation, The		12	12
18	Saudi Arabia	10	1	11
19	Sweden	1	9	10
20	Canada	6	4	10
21	Thailand	5	4	9
22	Luxembourg		8	8
23	New Zealand	5	2	7
24	Seychelles		6	6
25	Cayman Islands		6	6
26	France	1	5	6
27	Iran		5	5

No	Negara	Peradilan Agama	Peradilan Umum	Jumlah
28	Korea, The D.P.R Of (North K.)	1	4	5
29	Monaco		5	5
30	Switzerland		4	4
31	Ukraine		4	4
32	Turkey	4		4
33	Brunei		4	4
34	Greece		3	3
35	Vietnam		3	3
36	Algeria	2		2
37	Pakistan	1	1	2
38	Liechtenstein		2	2
39	Croatia	2		2
40	Panama		2	2
41	Hungary		2	2
42	Norway		2	2
43	Lebanon		2	2
44	Serbia, Republic Of	1		1
45	Macau	1		1
46	Nevis		1	1
47	Belgium		1	1
48	Cyprus	1		1
49	Bahamas		1	1
50	Northern Mariana Islands	1		1
51	East Timor		1	1
52	Yemen, Republic Of	1		1
53	Anguilla		1	1
54	Egypt		1	1
	Jumlah	222	685	907

Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara

Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadi lan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	2.369.064	616.859	2.704	3.120		2.991.747
	Jumlah Hakim	3.224	2.180	140	259		5.803
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:735	1:283	1:19	1:12		1:516
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	2.204	849	58	36		1.547
2	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	28.465	2.668	468	1.507	25.097	58.205
	Jumlah Hakim	698	421	28	59	73	1.279
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:41	1:6	1:17	1:26	1:344	1:46
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	122	19	50	77	1.031	137

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	12.302	9.711	1.157	447	7.521	31.138
Jumlah Hakim Agung	15	15	5	4	6	45
Rasio Hakim Agung dengan Beban Perkara	1:820	1:647	1:231	1:112	1:1254	1:692
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	2.460	1.942	694	335	3.761	2.076

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara diputus Pengadilan Tk Pertama	2.320.770	531.605	2.502	1.944		2.856.821
	Jumlah Hakim	3.224	2.180	140	259		5.803
	Rasio	1:720	1:244	1:18	1:8		1:989
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	2.160	732	54	23		2.967
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	25.369	2.641	409	1.388	17.053	46.860
	Hakim	698	421	28	59	73	1.279
	Rasio	1:36	1:6	1:15	1:24	1:234	1:37
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	109	19	44	71	701	110

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	12.297	9.621	1.157	447	7.386	30.908
Jumlah Hakim Agung	15	15	5	4	6	45
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:820	1:641	1:231	1:112	1:1231	1:687
Rerata produktivitas Tiap Hakim	2.459	1.924	694	335	3.693	2.061

Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara

Kontribusi dari PNBP

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.380.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.915.740.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.785.780.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.342.060.113
Jumlah			**75.143.960.113**

Kontribusi dari Putusan Pengadilan

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pajak

Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp. 15.140.928.659.410,20 (lima belas triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sen) dan USD 85.926.370,31 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dolar tiga puluh satu sen dolar amerika)

Putusan Perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana, selain menjatuhkan pidana juga mewajibkan terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Sepanjang tahun 2024 denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda	48.477.311.892.969
2	Uang Pengganti	38.774.721.835.094
	Jumlah	87.252.033.728.063

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2024	26.370.194.906	
2	Penerimaan Tahun 2024	28.161.037.564	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2024		25.293.991.768
4.	Saldo Akhir 2024		29.237.240.702
	Jumlah	54.531.232.470	**54.531.232.470**

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	8.701	150.000	Rp1.305.150.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2.576	150.000	Rp386.400.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.213	250.000	Rp303.250.000
Jumlah				Rp1.994.800.000

Bab 2
Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Program Pembaruan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Reformasi Birokrasi tidak lagi dievaluasi berdasarkan delapan area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), tetapi berdasarkan capaian-capaian reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik yang dihasilkan dalam bentuk indeks-indeks penilaian. Hal itu dilakukan agar evaluasi tidak lagi didasarkan pada dokumen semata, tetapi dilakukan terhadap *outcome* yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Beberapa Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Mahkamah Agung mendapat peningkatan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu 97,84 dengan predikat Sangat Baik karena nilai pada tahun sebelumnya adalah 83,9.

Indeks Pelayanan Publik

Pengadilan Militer III-15 Kupang terpilih mewakili Mahkamah Agung menjadi objek evaluasi dari PEKPPP dan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, meraih nilai 4,58 Kategori A, meningkat tahun sebelumnya hanya sebesar 4,12.

Mahkamah Agung juga mendapat penghargaan dalam komitmen penyelenggaraan pelayanan publik bagi kaum rentan, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat meraih penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik kategori pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Indeks Sistem Merit

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung memperoleh Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Indeks Pengelolaan Aset

Atas dedikasi, pencapaian, konstribusi, dan kinerja terbaik dalam bidang pengelolaan barang milik negara (BMN), Mahkamah Agung memperoleh penghargaan Juara II Anugerah Reksa Bandha pada Kategori Kualitas Pelaporan BMN Kelompok III dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024.

Indeks Reformasi Hukum

Mahkamah Agung mendapat peningkatan nilai yang sangat signifikan. Sebelumnya mendapat nilai 66,56 dengan predikat cukup, pada tahun 2024 Mahkamah Agung memperoleh nilai 99,28 dengan predikat AA (istimewa). Salah satu penghargaan yang diterima Mahkamah Agung yang juga menjadi unsur penilaian dari indikator ini adalah Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Indeks dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE Mahkamah Agung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,19 menjadi 3,52 dengan predikat sangat baik. Peningkatan tersebut didukung oleh capaian Mahkamah Agung dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik selama tahun 2024, antara lain, didukung oleh terbitnya kebijakan untuk menjadi pedoman di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembangunan Zona Integritas

Mahkamah Agung mengajukan 259 unit kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengikuti evaluasi secara mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024. Terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 sebanyak 16 unit kerja telah memiliki predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan sebanyak 243 unit kerja berpredikat WBK.

Pengembangan Organisasi

Peralihan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan ini mengalihkan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pajak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif.

Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035

Sepanjang 2024, berbagai rekomendasi dari hasil evaluasi ini mulai dilaksanakan dengan fokus utama pada penyelarasan antara temuan evaluasi dan program kerja strategis Mahkamah Agung. Selain itu, dilaksanakan konsultasi dengan anggota Tim Penasihat Pembaruan Mahkamah Agung juga

dilakukan untuk menyeleraskan agenda-agenda prioritas yang akan dilaksanakan dengan ekspektasi dan aspirasi dari pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

Hasil evaluasi Cetak Biru akan menjadi arah dalam pengembangan program-program pembaruan sepanjang tahun 2024--2035 sehingga tujuan pembaruan, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dan mewujudkan visi Mahkamah Agung (Menciptakan Badan Peradilan Indonesia yang Agung), dapat terwujud.

Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Program Pembaruan

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tanpa menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah:

a. memulihkan korban tindak pidana;
b. memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;
c. menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan
d. menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

Anugerah Mahkamah Agung

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kebijakan pembaruan peningkatan pelayanan keadilan, Mahkamah Agung memberikan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 kepada pengadilan-pengadilan yang berprestasi dalam melaksanakan kebijakan dengan kategori sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Peradilan Elektronik
b. Pelaksanaan e-Berpadu
c. Gugatan Sederhana
d. Mediasi di Pengadilan
e. Kinerja Layanan Eksekusi
f. Keterbukaan Informasi di Pengadilan
g. Survei Kepuasan Masyarakat

Mediasi

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi kepada 28 lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator nonhakim bersertifikat yang berperan sebagai mediator di pengadilan.

Peresmian Gedung Pengadilan Baru

Pada tahun 2024 telah diresmikan puluhan gedung pengadilan baru sebagai salah satu upaya dalam mendorong percepatan reformasi peradilan serta peningkatan kualitas layanan pengadilan, yang terdiri atas 5 gedung pengadilan tingkat banding dan 21 gedung pengadilan tingkat pertama.

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2024, antara lain, adalah sebagai berikut.

a. Aplikasi SIAP MA Terintegrasi.
b. Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*).
c. Aplikasi JDIH Versi Mobile.
d. Aplikasi DIKTUM.
e. Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari).
f. Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
g. Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (Siganis) Badilum.
h. Aplikasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Si Ampuh).
i. Aplikasi Ebinwas (Elektronik Pembinaan dan Pengawasan).
j. EAC (Elektronik Akta Cerai).
k. Monekstun (Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN).
l. Dalam rangka meningkatkan layanan di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan berbagai program antara lain:
   (1) Penilaian kinerja bagi seluruh unit kerja di bawahnya.
   (2) Penilaian Kinerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024.

m. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Lomba Peningkatan Pelayanan Pengadilan: Mewujudkan Pelayanan Prima di Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil di pengadilan tingkat banding ataupun pengadilan tingkat pertama.

Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Tabel Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1.	Peradilan Umum	1.229
2.	Peradilan Agama	26.867
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	22
	Total	28.118

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1.	Peradilan Umum	6.710
2.	Peradilan Agama	39.027
3.	Peradilan Militer	463
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	18
	Total	46.218

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Orang Penerima Layanan
1.	Peradilan Umum	79.385
2.	Peradilan Agama	235.522
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	3.372
	Total	318.279

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Sampai saat ini, terdapat total 115 pengadilan negeri dan 128 pengadilan agama yang menyediakan layanannya pada Mal Pelayanan Publik setempat.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2024, Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 264/SEK/SK.RA1.7/III/2024 tentang Penetapan 24 Pengadilan yang Mendapatkan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas Tahun Anggaran 2024 sehingga jumlah pengadilan yang menerima alokasi khusus sampai dengan tahun 2024 adalah 448 pengadilan.

Data Pelayanan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	3.843
2.	Layanan Informasi Badilum	164.046
3.	Layanan Informasi Badilag	285.654
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	258
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	2.190
Total		455.991

Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Pada tahun 2024 telah diterbitkan 3 edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 34 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 35 sebanyak 1.200 eksemplar, dan edisi 36 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/.

Newsletter Kepaniteraan

Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun 2024, Newsletter memuat 3 topik laporan utama, yaitu "Tertinggi dalam Sejarah, 90,32% Perkara Diminutasi Kurang dari 3 Bulan"; "7 Tahun Berturut-turut, MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di atas 90%"; dan "Upaya Hukum yang Dikabulkan: Kasasi 11,26% dan PK 11,82%".

Majalah Dandapala

Dandapala (yang berarti penjaga keadilan) merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum), sepanjang tahun 2024 terbit sebanyak 6 edisi, yaitu edisi 57 sampai 62.

Majalah Peradilan Agama

Pada tahun 2024 Majalah Peradilan Agama terbit 1 (satu) kali, yaitu Edisi 23 pada bulan November 2024 mengangkat tema "Membangun Agilitas Kepemimpinan di Peradilan Agama".

Majalah Integritas

Pada Juni 2024, telah terbit Majalah Integritas Volume II dengan topik utama, Zona Integritas: Catatan Pembangunan Zona Integritas pada Mahakmah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang terbit tiga kali dalam setahun termasuk tahun 2024.

Bab 3
Manajemen Sumber Daya Manusia

Program Pembaruan

Mahkamah Agung terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN) melalui pengembangan kompetensi dan percepatan transformasi digital. Beberapa inovasi pembaruan yang digagas antara lain: Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai), Artikel Hukum Hakim Nusantara (Arunika) yang juga merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai, Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Teknis Administrasi (Dimensi), SIPINTAR (Sistem Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama), Rekam jejak secara elektronik atau *electronic track record* (ETR), Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas), LMS Menpim Optima, dan aplikasi Layanan Administrasi Kediklatan dan Rekapitulasi (Laskar).

Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Untuk menjamin transparansi dalam proses rekrutmen, seleksi yang dilaksanakan diwujudkan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), menampilkan nilai hasil tes secara langsung pada layar lebar setelah peserta selesai mengerjakan tes dan memfasilitasi pihak lain untuk memantau nilai peserta secara langsung saat peserta sedang menjalani seleksi.

Komposisi Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan

Komposisi Pegawai

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	45									45
Hakim	322	738	3.224	426	2.181	28	140	60	259	7.378
Hakim Ad Hoc	9	108	350							467
Panitera	1	33	372	34	410	4	19	7	30	910
Panitera Muda		128	1.114	67	1.058	8	17	15	57	2.464
Panitera Pengganti		508	2.108	635	1.031	9	55	71	201	4.618
Jurusita			1.482		1.127			12	60	2.681
Struktural	348	228	1.360	233	1.397	27	66	54	114	3.827
Fungsional	576	171	525	190	634	2	14	25	73	2.210
Pelaksana	301	553	3.706	398	2.164	87	247	55	299	7.810
PPPK	18	64	40	58	42	8	3	6	3	242
Total	**1.620**	**2.531**	**14.281**	**2.041**	**10.044**	**173**	**561**	**305**	**1.096**	**32.652**

*) data SIKEP per 31 Desember 2024

Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung mendapatkan alokasi formasi pegawai sebanyak 14.216.

Rekrutmen

Rekrutmen ASN

Tahun 2024 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen CPNS dengan jumlah formasi 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) dan PPPK dengan jumlah formasi 9.276 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) dengan penjelasan sebagai berikut.

Selain itu terdapat juga pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 sebanyak 8240 formasi.

Rekrutmen Hakim Ad Hoc

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi sejumlah 24 orang.

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*)

Dalam rangka implementasi kebijakan SDM berbasis kompetensi, tahun 2024 Mahkamah Agung melalui Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) melakukan penilaian potensi dan kompetensi ASN sejumlah 1.695 pegawai. Guna mendapatkan ketua dan wakil ketua pengadilan yang berkualitas serta berintegritas tinggi, Unit Penilaian Kompetensi telah melakukan asesmen terhadap wakil ketua dan hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Peradilan

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknis

No.	Jenis Program Pelatihan	Target (orang)	Lulus (orang)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu	1459	1456
2.	Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional	400	405
3.	Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional	200	201
4.	Pelatihan Teknis Yudisial	156	156
5.	Pelatihan Singkat	166	166
6.	*Training of Tutor* & *Training of Mentor* PPCH Terpadu	643	643
Total		3.024	3.027

Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)
1.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1.096	1.096
2.	Pelatihan Bela Negara bagi PPPK	155	155
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	160	160
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum	2.172	2.435
5.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	382	396
Total		**3.965**	**4.242**

Tanda Kehormatan dan Satyalancana Karya Satya

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2024

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalencana Karya Satya XXX	1.316
2.	Satyalencana Karya Satya XX	553
3.	Satyalencana Karya Satya X	441
Total		2.310

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2024

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	44
2.	Karya Satya Dwi Windu	70
Total		114

Promosi dan Mutasi

Promosi dan Mutasi SDM

Tabel Promosi dan Mutasi SDM

Klasifikasi	Jabatan	Promosi	Mutasi
Tenaga Teknis Peradilan	Hakim Tk. Banding	29	623
	Hakim Tk. Pertama	316	1.654
	Hakim Ad Hoc		100
	Panitera	178	305
	Panitera Muda	705	420
	Panitera Pengganti	464	597
	Juru Sita	102	84
	Juru Sita Pengganti		242
Tenaga Non Teknis	Eselon I	1	4
	Eselon II	11	12
	Eselon III	68	39
	Eselon IV	176	260
	Fungsional	52	523
	Pelaksana		2.248
Total		**2102**	**7.111**

Pengangkatan Pejabat Fungsional

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Arsiparis	1
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	142
3.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
4.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	127
5.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	2
6.	Pranata Komputer	14
7.	Pranata Peradilan	78
8.	Widyaiswara	2
Total		374

Penghargaan

Pada tanggal 26 September 2024, Mahkamah Agung RI menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat.

Bab 4
Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

Program Pembaruan

Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Selain penggunaan aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1. Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Simari).
2. Aplikasi E*lectronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability* (e-Bima).
3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas).

Peran Strategis Data BMN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung menempatkan data BMN sebagai aset strategis yang memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pendekatan *data-driven* telah menjadi strategi utama dalam mengelola dan memanfaatkan barang milik negara sehingga memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

Pembaruan Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Manajemen Keuangan

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024

Mahkamah Agung mengambil kebijakan dalam melakukan kegiatan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 yaitu dilakukan secara daring dan luring. Kebijakan tersebut merupakan strategi Mahkamah Agung dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal itu terbukti dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kedua belas kalinya secara berturut-turut dari BPK.

Langkah-Langkah Strategis Mahkamah Agung Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp)

1. Meningkatkan kompetensi dan komitmen pimpinan hingga staf dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, akurat, dan akuntabel, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan, asistensi, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan yang secara terus-menerus atas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
3. Menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang intensif secara berjenjang antarunit organisasi tingkat K/L, eselon I, wilayah, dan satuan kerja serta unit internal pada bagian masing-masing.
4. Melakukan percepatan pemantauan data keuangan dan barang milik negara lebih awal pada Mosakti menu *to do list*, *pemantauan*, dan daftar/perincian.
5. Menyusun laporan keuangan dari tingkat satker, wilayah, eselon I, dan kementerian/lembaga dengan andal dan tepat waktu pada semester I, triwulan III, semester II *unaudited* dan *audited* yang memenuhi karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan dan andal serta dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
6. Melaporkan saldo kas keuangan perkara dan saldo keuangan perkara di rekening pemerintah lainnya (RPL) dalam penguasaan Bendahara Penerimaan (termasuk saldo RPL) setiap bulan.
7. Meminimalkan temuan berulang BPK atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan belum berjalannya sistem pengendalian internal (SPI) secara memadai.
8. Meningkatkan implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) dengan efektif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sampai dengan pencatatan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
9. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan hasil reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 sesuai dengan rencana aksi.
10. Menyusun regulasi, petunjuk teknis, dan pemutakhiran peraturan dengan merevisi pedoman akuntansi berbasis akrual disesuaikan dengan aturan terkini, baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal Kementerian Keuangan.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan PMK No. 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2024, Mahkamah Agung telah melaksanakan penetapan standar biaya keluaran khusus tahun 2024 untuk unit Eselon 1 dan klasifikasi perincian keluaran sebagai berikut.

No	Unit Eselon 1	Klasifikasi Rincian Output
1.	Kepaniteraan	Perkara Hukum Perseorangan (1044.BCA)
2.	Ditjen Badan Peradilan Umum	Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA dan 1049.QCA)
3.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Hukum Perseorangan (1058.BCA)

Mahkamah Agung telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utamanya, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, perkara pidana militer, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00.

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pagu Alokasi Anggaran
Pagu Per Unit Eselon I

No.	Unit Eselon I	Pagu Alokasi 2024	Automatic Adjusment	Relaksasi AA	Sisa Relaksasi AA (blokir)	Pagu Menjadi 2024
1.	Kepaniteraan	212,525,960.000,00	1.719.641.000,00	1.719.641.000,00	0	212,525,960.000
2.	Badan Peradilan Umum	145,280,941.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	145,280,941.000
3.	Badan Peradilan Agama	123,860,368.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	123,860,368.000
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	30,979,225.000,00	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	0	30,979,225.000
5.	Badan Urusan Administrasi	11,140,083,099.000,00	843.590.929.000,00	830.321.541.000,00	13.269.388.000,00	11.126.813.711.000
6.	Badan Pengawasan	88,013,162.000,00	4.424.357.000,00	4.424.357.000,00	0	88,013,162.000
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	163,025,357.000,00	15.190.027.000,00	13.317.544.000,00	1.872.483.000,00	161.152.874.000
Total		11.903.768.112.000,00	886.688.954.000,00	871.547.083.000,00	15.141.871.000,00	11.888.626.241.000,00

Program Prioritas Nasional

Alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung digunakan untuk memenuhi kegiatan prioritas sebagai berikut.

a. Pengembangan Aplikasi e-Court Upaya Hukum Kasasi dan PK
b. Peningkatan fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
c. Peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan
d. Bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif

e. Bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum
f. Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
g. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
h. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu
i. Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
j. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
k. Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara
l. Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan militer
m. Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum
n. Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
o. Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
p. Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung
q. Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung
r. Diklat Sertifikasi Hakim Niaga
s. Diklat Sertifikasi Hakim Mediator
t. Pedoman implementasi *restorative justice* perkara jinayah

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
2.	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00
3.	2022	7.486.002.321.000,00	2.592.696.388.500,00	1.741.434.690.500,00	11.820.133.400.000,00
4.	2023	7.333.345.686.000,00	2.730.640.295.000,00	1.844.937.734.000,00	11.908.923.715.000,00
5.	2024	7,765,344,168,000,00	3,040,036,483,000,00	1,120,111,847,000,00	11,925,492,498,000,00

Hibah

Tabel Hibah Menurut Bentuknya

Bentuk Hibah	Jumlah satker	Nilai Perolehan (Rp)
Hibah barang	332	138.304.456.634,00
Hibah uang	9	6.212.524.000,00
Hibah jasa	20	35.789.136.406,00
Total	361	180.306.117.040,00

Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
No.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000,00	10.780.875.985.182,00	97,56%	269.167.743.818,00	2,44%
	Program Dukungan Manajemen	11.050.043.729.000,00	10.780.875.985.182,00	97,56%	269.167.743.818,00	2,44%
2.	Kepaniteraan	222.006.897.000,00	220.513.142.916,00	99,33%	1.493.754.084,00	0,67%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.773.175.000,00	15.126.510.524,00	95,90%	646.664.476,00	4,10%
	Program Dukungan Manajemen	206.233.722.000,00	205.386.632.392,00	99,59%	847.089.608,00	0,41%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum	149.234.382.000,00	144.984.818.128,00	97,15%	4.249.563.872,00	2,85%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.576.210.000,00	85.032.006.002,00	97,09%	2.544.203.998,00	2,91%
	Program Dukungan Manajemen	61.658.172.000,00	59.952.812.126,00	97,23%	1.705.359.874,00	2,77%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama	135.205.164.000,00	126.994.913.903,00	93,93%	8.210.250.097,00	6,07%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.467.161.000,00	70.829.968.873,00	97,74%	1.637.192.127,00	2,26%
	Program Dukungan Manajemen	62.738.003.000,00	56.164.945.030,00	89,52%	6.573.057.970,00	10,48%
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	31.161.153.000,00	30.514.642.709,00	97,93%	646.510.291,00	2,07%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.444.425.000,00	9.206.799.461,00	97,48%	237.625.539,00	2,52%
	Program Dukungan Manajemen	21.716.728.000,00	21.307.843.248,00	98,12%	408.884.752,00	1,88%
6.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	249.828.011.000,00	240.054.298.040,00	96,09%	9.773.712.960,00	3,91%
	Program Dukungan Manajemen	249.828.011.000,00	240.054.298.040,00	96,09%	9.773.712.960,00	3,91%
7.	Badan Pengawasan	88.013.162.000,00	83.228.537.140,00	94,56%	4.784.624.860,00	5,44%
	Program Dukungan Manajemen	88.013.162.000,00	83.228.537.140,00	94,56%	4.784.624.860,00	5,44%
Jumlah		11.925.492.498.000,00	11.627.166.338.018,00	97,50%	298.326.159.982,00	2,50%
Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER JENIS BELANJA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
NO.	BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Belanja Pegawai	7.765.344.168.000,00	7.565.783.669.589,00	97,43%	199.560.498.411,00	2,57%
2.	Belanja Barang	3.040.036.483.000,00	2.956.975.619.433,00	97,27%	83.060.863.567,00	2,73%
3.	Belanja Modal	1.120.111.847.000,00	1.104.407.048.996,00	98,60%	15.704.798.004,00	1,40%
Jumlah		11.925.492.498.000,00	11.627.166.338.018,00	97,50%	298.326.159.982,00	2,50%
Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000,00	10.780.875.985.182,00	97,56%	269.167.734.818,00	2,44%
2.	Kepaniteraan	222.006.897.000,00	220.513.142.916,00	99,33%	1.493.754.084,00	0,67%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum	149.234.382.000,00	144.984.818.128,00	97,15%	4.249.563.872,00	2,85%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama	135.205.164.000,00	126.994.913.903,00	93,93%	8.210.250.097,00	6,07%
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	31.161.153.000,00	30.514.642.709,00	97,93%	646.510.291,00	2,07%
6.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	249.828.011.000,00	240.054.298.040,00	96,09%	9.773.712.960,00	3,91%
7.	Badan Pengawasan	88.013.162.000,00	83.228.537.140,00	94,56%	4.784.624.860,00	5,44%
Jumlah		11.925.492.498.000,00	11.627.166.338.018,00	97,50%	298.326.159.982,00	2,50%
Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024

Tahun 2024 target PNBP diusulkan sebesar Rp86.905.618.000,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP dengan realisasi penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 telah mencapai Rp105.803.181.237,00 (seratus lima miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan puluh satu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau mencapai 121,74%.

Penggunaan Dana PNBP Tahun 2024

Tabel Realisasi Belanja Sumber Dana Pnbp Mahkamah Agung 2024 Per Eselon I (Per 31 Desember 2024)

Eselon I	Jumlah Pagu	Jenis Belanja	Pagu DIPA Sumber Dana PNBP	Realisasi Penggunaan Dana PNBP	Jumlah Realisasi Penggunaan Dana PNBP	Persentase Realisasi
02 - Kepaniteraan	Rp62.192.000,00	BelanjaModal-53	Rp62.192.000,00	Rp23.088.000,00	Rp23.088.000,00	37,12%
03 - Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp7.816.746.000,00	BelanjaBarang-52	Rp867.746.000,00	Rp864.473.912,00	Rp7.813.144.122,00	99,95%
		BelanjaModal-53	Rp6.949.000.000,00	Rp6.948.670.210,00		
04 - Ditjen Badan Peradilan Agama	Rp22.636.550.000,00	BelanjaBarang-52	Rp5.388.550.000,00	Rp4.294.145.194,00	Rp17.209.105.194,00	76,02%
		BelanjaModal-53	Rp17.248.000.000,00	Rp12.914.960.000,00		
05 - Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp356.740.000,00	BelanjaBarang-52	Rp28.000.000,00	Rp27.989.000,00	Rp316.789.000,00	88,80%
		BelanjaModal-53	Rp328.740.000,00	Rp288.800.000,00		
TOTAL	Rp30.872.228.000,00		Rp30.872.228.000,00	Rp21.129.128.521,00	Rp25.362.126.316,00	82,15%

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pada Mahkamah Agung Tahun 2024

Tabel Kerugian Negara per 31 Desember Tahun 2024 *(Dalam Rupiah)*

sebagai Status penyelesaian		JUMLAH KASUS	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN REVIU BADAN PENGAWASAN S/D 31 Desember 2024	SISA ANGSURAN
A	SUDAH PENETAPAN				
1.	Tuntutan Perbendaharaan	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2.	TGR (Nonbendahara)	266	3.189.719.047,00	3.170.981.541,00	18.737.506,00
3.	Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
B	PROSES PENETAPAN				
1.	Tuntutan Perbendaharaan	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0,00
2.	TGR (Nonbendahara)	0	0,00	0,00	0,00
3.	Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
C	INFORMASI				
1.	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2.	APIP	16	518.543.961,76	518.543.961,76	0,00
JUMLAH		728	29.950.312.263,74	29.931.574.757,74	18.737.506,00

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024 meliputi 47 laporan terdiri atas 795 temuan yang memuat 1.909 rekomendasi sebesar Rp55.550.144.690,40 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah empat puluh sen).

Manajemen Aset

Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai BMN Mahkamah Agung

Nilai barang milik negara (BMN) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2024 adalah Rp32.391.552.262.519,00 (tiga puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Beberapa kebijakan strategis Mahkamah Agung terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN yang dikeluarkan pada 2024 adalah sebagai berikut.

1. **Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung No. 119/SEK/PL1.2/V/2024**
   "Persiapan Migrasi Data Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka Implementasi SIMAN v2"
2. **Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung No. 2865/SEK/PL1.2.1/V/2024**
   "Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun Anggaran 2026"
3. **Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 275/SEK/PL1.2.1/VIII/2024**
   "Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya"
4. **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024**
   "Pendelegasian sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/ Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara"
5. **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1393/SEK/SK.PL1/X/2024**
   "Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 3.5 Fitur Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)"
6. **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1394/SEK/SK.PL1/X/2024**
   "Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 3.6 Fitur Standardisasi"
7. **Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2024**
   "Petunjuk Teknis tentang Pengajuan Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya"

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Tabel Hasil Rekapitulasi Penelaahan Usulan RKBMN Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026 Pada Masing-Masing Tahapan

Usulan Satker					Hasil Telaah yang Disetujui									
					Tingkat Korwil					Tingkat Eselon I				
Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN		
		Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan
1.187	122.124	63	241	2.030	1.187 (100%)	122.124 (100%)	63 (100%)	241 (100%)	2.030 (100%)	1.072 (90,31%)	122.078 (99,96%)	61 (96,82%)	241 (100%)	1.990

Hasil Telaah yang Disetujui														
Tingkat Lembaga					APIP					DJKN				
Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN		
		Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan
1.044 (87,95%)	121.380 (99,39%)	59 (93,65%)	241 (100%)	1.980	1.001 (84,33%)	121.114	58 (92,06%)	241 (100%)	1.979 (94,78)	310 (26,12%)	120.918 (99,01%)	59 (93,65%)	241 (100%)	1.980

Catatan Hasil Penelaahan RKBMN Mahkamah Agung pada tautan https://s.id/CatatanHasilPenelaahanRKBMN

Penetapan Status Penggunaan BMN

Tabel Perbandingan PSP BMN Tahun 2023 dan 2024

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2023		TA 2024	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelola barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	540	1.852.326.552.712	583	1.946.251.258.331
2.	Pengguna barang	BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit/ satuan/item	775	400.488.905.471	886	422.012.611.929

Percepatan Sertipikasi Tanah Pemerintah

Tabel Percepatan Sertipikasi BMN berupa Tanah Berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO.	LINGKUNGAN	SUDAH BERSERTIPIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI			
		2023	%	2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Eselon I, kantor pusat	42 bidang dari total 49 bidang	86%	52 bidang dari total 57 bidang	91%
		165.617 m^2 dari total luas 173.742 m^2		164.338 m^2 dari total luas 168.496 m^2	
2.	Umum	2.374 bidang dari total 2.449 bidang	97%	2.406 bidang dari total 2.458 bidang	98%
		4.593.183 m^2 dari total luas 4.793.173 m^2		4.823.390 m^2 dari total luas 5.004.100 m^2	
3.	Agama	1.034 bidang dari total 1.074 bidang	96%	1.087 bidang, dari total 1.133 bidang	96%
		2.632.667 m^2 dari total luas 2.751.479 m^2		2.588.706 m^2 dari total luas 2.739.080 m^2	
4.	Militer	33 bidang dari total 34 bidang	97%	35 bidang dari total 35 bidang	100%
		75.294 m^2 dari total luas 77.268 m^2		8.676 m^2 dari total luas 78.676 m^2	
5.	Tata usaha negara	97 bidang dari total 101 bidang	96%	96 bidang dari total 100 bidang	96%
		212.007 m^2 dari total luas 225.858 m^2		224.006 m^2 dari total luas 244.732 m^2	
Total Keseluruhan		3.580 bidang dari total 3.707 bidang	96,57%	3.676 bidang dari total 3.783 bidang	97,17%
		7.678.768 m^2 dari total luas 8.021.520 m^2		7.879.116 m^2 dari total luas 8.235.084 m^2	

Dukungan Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Peradilan

Progres Pembangunan 13 Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding Baru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 sampai dengan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan 13 Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung telah melaksanakan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut.

a. Sebanyak 5 gedung pengadilan tingkat banding (38,46%) telah diresmikan.
b. Sebanyak 8 gedung pengadilan tingkat banding (61,54%) belum diresmikan.

Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Pascabencana

Terdapat empat satuan kerja terdampak bencana yang sudah dilakukan pembangunan sejak tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2024 dan telah diresmikan pada tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
b. Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
c. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; dan
d. Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Fitur-Fitur Baru Pengelolaan BMN Melalui Aplikasi E-Sadewa

Aplikasi kerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang dimiliki Mahkamah Agung yang dinamakan e-Sadewa terus melakukan pengembangan fitur dan peningkatan fungsi dalam menunjang proses bisnis pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Manajemen Teknologi Informasi

Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.6.0

Rilis update terhadap aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding dilakukan secara bertahap. Tahap I, update dilakukan pada bulan Januari 2024 yang semula aplikasi SIPP versi 5.3.0 menjadi 5.4.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.4.0 adalah sebagai berikut.

1. Integrasi data antara aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada lingkungan peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah).
2. Integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah).
3. Pengembangan fitur Administrasi Berkas Perkara secara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (bundel A-B) pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
4. Integrasi data antara aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama dengan aplikasi e-Berpadu pada lingkungan peradilan militer.

Tahap II, update dilakukan pada bulan April 2024 yang semula aplikasi SIPP versi 5.4.0 menjadi 5.5.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.5.0 adalah pengiriman berkas permohonan kasasi/ peninjauan kembali secara elektronik dari SIPP yang terintegrasi dengan aplikasi SIAP Mahkamah Agung.

Tahap III, update dilakukan pada bulan september 2024 yang semula aplikasi sipp versi 5.5.0 menjadi 5.6.0. peningkatan fitur dalam aplikasi sipp tingkat pertama dan tingkat banding versi 5.6.0 adalah sebagai berikut.

Semua Lingkungan Badan Peradilan:

1. penambahan fitur deteksi dini perkara;
2. penambahan fitur permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali;
3. penambahan fitur alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali; dan
4. integrasi data (API) aplikasi SIPP dengan SIAP, aplikasi SIPP dengan e-Court, aplikasi SIPP dengan e-Berpadu.

Lingkungan Badan Peradilan Umum:

1. penambahan fitur laporan kasasi (perpanjangan penahanan) pada halaman detil register kasasi;
2. penambahan opsi surat tercatat pada perekaman data pemberitahuan putusan dan pelaksanaan relaas;
3. penambahan vonis putusan nilai ganti kerugian pada perkara pidana;
4. penambahan fitur perekaman data calon mempelai pada perkara permohonan dispensasi nikah;
5. perubahan caption anak korban menjadi korban pada halaman tab data umum.
6. penambahan fitur registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court);
7. penambahan fitur pencabutan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court); dan
8. penambahan fitur registrasi upaya hukum untuk peninjauan kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

Lingkungan Badan Peradilan Agama:

1. penambahan fitur laporan kasasi (perpanjangan penahanan) pada halaman detail register kasasi;
2. penambahan opsi surat penambahan opsi surat tercatat pada perekaman data pemberitahuan putusan dan pelaksanaan relaas;
3. penambahan vonis bebas dari dakwaan dan lepas dari tuntutan (untuk Mahkamah Syar'iyah);
4. penambahan fitur registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court);
5. penambahan pada fitur pencabutan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court); dan
6. penambahan fitur registrasi upaya hukum untuk peninjauan kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara:

1. penambahan opsi surat tercatat pada perekaman data pemberitahuan putusan dan pelaksanaan relaas;
2. penambahan fitur registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court);
3. penambahan pada fitur pencabutan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court); dan
4. penambahan fitur registrasi upaya hukum untuk peninjauan kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

Lingkungan Badan Peradilan Militer:

1. penambahan fitur laporan kasasi (perpanjangan penahanan) pada halaman detil register kasasi; dan
2. penambahan nama satuan kerja lemasmil dan staltahmil pada fitur perekaman data penahanan/perpanjangan penahanan.

Aplikasi E-Court Versi 6.0.0

Pengembangan aplikasi e-Court versi 6.0.0 pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

A. Fitur Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Penambahan fitur untuk permohonan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
2. Penambahan fitur untuk pendaftaran kuasa (apabila pengguna terdaftar yang mengajukan permohonan).
3. Penambahan fitur untuk memilih pihak pemohon dan termohon untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
4. Penambahan fitur untuk mengunggah dokumen memori peninjauan kembali (khusus untuk upaya hukum peninjauan kembali).

5. Penambahan fitur untuk mencetak surat kuasa untuk membayar (SKUM)
6. Penambahan fitur untuk pembayaran biaya perkara.

B. Fitur Administrasi Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Penambahan fitur untuk detail informasi perkara.
2. Penambahan fitur untuk akta kasasi dan peninjauan kembali, akta pencabutan, dan akta TMS.
3. Penambahan fitur untuk kuasa hukum.
4. Penambahan fitur untuk informasi pembayaran.
5. Penambahan fitur untuk e-Summon dan surat tercatat, penyampaian memori kasasi dan peninjauan kembali, serta penyampaian kontra memori kasasi dan peninjauan kembali.
6. Penambahan fitur untuk unggah bundel A dan bundel B.
7. Penambahan fitur untuk inzage.
8. Penambahan fitur untuk putusan kasasi dan peninjauan kembali.
9. Penambahan fitur untuk informasi jurnal biaya perkara.

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Mahkamah Agung

Pada tahun 2024 dilakukan pengembangan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) untuk upaya hukum banding yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses administratif di pengadilan serta meminimalkan kesalahan dalam pengajuan permohonan banding. Melalui pengembangan aplikasi e-Berpadu, upaya hukum banding diharapkan dapat menciptakan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel.

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2024 SPPT-TI Mahkamah Agung telah terintegrasi dengan aplikasi e-Berpadu dalam hal pemanfaatan dan pertukaran data permintaan izin dan persetujuan penggeledahan serta data permintaan izin dan persetujuan penyitaan. SPPT-TI Mahkamah Agung juga telah dikembangkan dengan menerapkan metode enkripsi deskripsi dalam pengiriman data ke aparat penegak hukum lain serta peningkatan fitur dashboard SPPT-TI Mahkamah Agung.

Deteksi Dini Perkara (*Early Case Detection System*)

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Deteksi Dini Perkara, bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung. Deteksi Dini merupakan inovasi Mahkamah Agung dalam upaya mendeteksi kemiripan perkara dan keterkaitan antarperkara yang disidangkan di pengadilan seluruh Indonesia. Upaya ini untuk mencegah disparitas putusan pada perkara yang mirip.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan aplikasi SIMARI-PNBP dari versi 2.2.0 menjadi versi 2.3.0 untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan, penyajian informasi, dan laporan-laporan seputar PNBP.

Kegiatan Surveilance Audit ISO 20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan dan memastikan komitmen organisasi dalam mengimplementasikan ISO 20000-1:2018, dilakukan surveillance audit ISO 20000-1:2018 tahun II (kedua) pada bulan Oktober 2024.

Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik (SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi)

Pada bulan Mei 2024 Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung Terintegrasi telah digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama pada seluruh lingkungan Badan Peradilan (SIPP versi 5.5.0). Bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung, aplikasi SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi dirilis secara resmi dengan penambahan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali untuk perkara perdata melalui aplikasi e-Court.

Bab 5
Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

Program Pembaruan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung yang ditindak lanjuti oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dasar perubahan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Puslitbang Kumdil MARI) menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Pustrajak Kumdil MARI). Perubahan nomenklatur tersebut mengubah nomenklatur, struktur organisasi serta tugas dan fungsi Pustrajak Kumdil MARI.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) pembaruan yang dilakukan guna mendukung tugas dan fungsi tersebut sebagai berikut :

Perubahan Output dan Pencapaian Target Kerja

Pustrajak Kumdil MARI berfungsi untuk mendukung secara responsif dalam menyiapkan analisis kebijakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Output analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan dihasilkan dalam bentuk Naskah Akademik, Naskah Kebijakan (Policy Paper), Naskah Urgensi, Policy Brief dan Policy Memo disertai dengan Rancangan Peraturan/Kebijakannya.

Advokasi Kebijakan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 mengamanatkan tugas dan fungsi advokasi kebijakan yang menjadi salah satu perubahan penting.

Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Kebijakan

Pustrajak Kumdil MARI telah melaksanakan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan berupa penyusunan Naskah Akademik, Naskah Kebijakan (Policy Paper) dan Naskah Urgensi sebanyak 21 topik yang merupakan hasil inventarisasi isu strategis dari perintah pimpinan dalam rapat pleno kamar dan analisis kebutuhan lembaga.

1. Naskah Urgensi Perubahan Pedoman Penerapan Sistem Kamar dan Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 dan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014)
2. Naskah Urgensi tentang Perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Naskah Kebijakan tentang *One Day Publish* dan *One Day Minute* Dikaitkan dengan Pemenuhan Administrasi Perkara dan Hukum Acara di Peradilan Agama
4. Naskah Urgensi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Naskah Kebijakan tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
6. Naskah Kebijakan tentang Implementasi Putusan Peninjauan Kembali terhadap Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer
7. Naskah Urgensi tentang Reorganisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
8. Naskah Kebijakan tentang Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural Pimpinan Pengadilan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
9. Naskah Kebijakan tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi di Indonesia
10. Naskah Kebijakan tentang Grand Design Pola Pengembangan Kompetensi Calon Hakim
11. Naskah Kebijakan tentang Pembentukan Balai Diklat Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali
12. Naskah Kebijakan tentang Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Mendukung Fungsi Regulator pada Mahkamah Agung RI
13. Naskah Kebijakan tentang Pedoman Penatausahaan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
14. Naskah Urgensi tentang Tingkat Kepatuhan Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15. Naskah Urgensi tentang Penyeragaman Nomenklatur Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya
16. Naskah Urgensi tentang Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepailitan (Al-Taflis) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nadhirah) pada Lembaga Keuangan Syariah
17. Naskah Urgensi tentang Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

18. Naskah Kebijakan tentang Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024
19. Naskah Urgensi tentang Tata Kelola Pelayanan Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan dengan Pemodelan Dinamis Eksekusi Perdata untuk Mendukung Bussiness Enabling Environment
20. Naskah Kebijakan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara dan Fungsi Kehumasan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
21. Naskah Kebijakan tentang Nomenklatur Jabatan, Organisasi, dan Tata Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab

Advokasi Kebijakan dan Publikasi

Advokasi Kebijakan

No	Topik Naskah	Tahun Penyusunan	Keterangan
1.	Naskah Urgensi tentang Rancangan PERMA Tentang Sertifikasi Hakim Jinayat	2022	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilan SK KMA Nomor 117/KMA/SK.DL1.2/V/2024 tentang Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Jinayat
2.	Naskah Urgensi tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
3.	Naskah Kebijakan tentang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
4.	Naskah Kebijakan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilan SK KMA Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Mahkamah Agung
5.	Naskah Kebijakan tentang Panduan Teta Kelola Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan dengan Biro Hukum dan Humas MARI dan Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan MA RI pada tanggal 1 s.d 4 Oktober 2024 dan menghasilkan draft rancangan perubahan SK KMA Nomor 140 Tahun 2008
6.	Naskah Urgensi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia	2024	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
7.	Naskah Urgensi Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dalam Mendukung Fungsi Regulator Pada Mahkamah Agung RI	2024	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian MA RI dengan menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kebijakan pada MA RI kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Surat SEKMA Nomor 4463/SEK/KP1.1.8/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Publikasi

E-book pada Pustrajak Kumdil MARI merupakan sarana penyebarluasan hasil-hasil penelitian di tahun 2010-2022 dan hasil-hasil analisis kebijakan di tahun 2023-2024 yang telah dikunjungi oleh 9.869 pengunjung sepanjang tahun 2024, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang berjumlah 7.825 pengunjung.

Selain itu, Pustrajak Kumdil MARI juga konsisten memberikan wadah bagi para hakim, akademisi, praktisi, peneliti, dan ahli hukum dalam menyebarluaskan gagasan dan pemikiran di bidang hukum dan peradilan melalui penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) sejak tahun 2012.

Jumlah sitasi JHP di tahun 2024 mencapai 886 sitasi, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 840 sitasi. Selain itu, di tahun 2024 JHP juga telah memperluas cakupan pengangksesnya yang ditunjukan dengan peningkatan jumlah negara pengakses sebanyak 110 negara di tahun 2023 menjadi 135 negara di tahun 2024.

Putusan Penting (*Landmark Decision*)

PIDANA UMUM

I. Putusan No. 287 K/Pid/2024

Nomor Perkara	287 K/Pid/2024
Terdakwa	Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi	Tindak Pidana Penipuan
Majelis Hakim	1. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Yanto, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbuatan admin arisan *online* yang menjanjikan membayar kewajibannya namun tidak dilaksanakan merupakan tindak pidana penipuan
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan menjadi Landmark Decision	Perluasan makna tindak pidana penipuan

II. Putusan No. 575 K/Pid/2024

Nomor Perkara	575 K/Pid/2024
Terdakwa	Untung
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Majelis Hakim	1. Soesilo, S.H., M.H. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Sutarjo, S.H., M.H.

Nomor Perkara	575 K/Pid/2024
Panitera Pengganti	Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
Kaidah Hukum	Ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang dinyatakan tidak berlaku ketika proses pemeriksaan perkara pidana sedang berjalan mengakibatkan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut menjadi bukan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Terdakwa
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penegasan asas legalitas.

III. Putusan No. 592 K/Pid/2024

Nomor Perkara	592 K/Pid/2024
Terdakwa	1. P. Dusol panggilan Dusol gelar Sutan Gandamsyah bin Basir 2. Lisda panggilan Lisda binti Basir
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Pemalsuan
Majelis Hakim	1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. 2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbuatan seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai mamak kepala waris yang mensertifikatkan tanah pusako tinggi merupakan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan Menjadi Landmark Decision	Pengakuan struktur masyarakat adat.

IV. Putusan No. 922 K/Pid/2023

Nomor Perkara	922 K/Pid/2023
Terdakwa	Bambang Sidik Achmadi, S.H.
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Hukum	Tindak Pidana Kealpaan mengakibatkan kematian dan luka
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Meni Warlia, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perwira pengendali pada pengamanan suporter yang memerintahkan tindakan penembakan gas air mata kepada suporter sepakbola yang rusuh dan mengancam petugas lapangan merupakan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan Menjadi Landmark	Perwira pengendali bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan bawahannya

PIDANA KHUSUS

Putusan No. 5484 K/Pid.Sus/2021

Nomor Perkara	5484 K/Pid.Sus/2021
Terdakwa	Munarman, S.H.
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Terorisme
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Achmad Munandar, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Seseorang yang mengikuti seminar dan memberi dukungan kepada organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris termasuk tindak pidana terorisme
Amar Putusan	Tolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan
Alasan Menjadi Landmark Decision	Perluasan makna perbuatan tindak pidana terorisme

PERDATA

I. Putusan Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Nomor Perkara	13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
Para Pihak	LINDA ANGGREANINGSIH, sebagai Pemohon melawan 1. MUHAMMAD SHAKEEL 2. PT. NUSHEL JAYA MANDIRI, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Sengketa Merek
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Febry Widjajanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Gugatan terhadap suatu merek tertentu dalam hal menghentikan produksinya dan memusnahkan produknya harus ditolak apabila merek tersebut tidak pernah dibatalkan.
Amar Putusan	Menolak Permohonan Peninjauan Kembali
Alasan menjadi Landmark Decision	Perbuatan menghentikan produksi dan memusnahkan produknya harus diikuti dengan permohonan pembatalan merek.

II. Putusan Nomor 853 PK/Pdt/2024

Nomor Perkara	853 PK/Pdt/2024
Para Pihak	1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag, 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA, sebagai Para Pemohon melawan 1. Drg. I GEDE PUTU WIRYA. M.Kes., 2. NI MADE SRI HARYATI, 3. BAGUS GEDE DODDY PRATHAMA, 4. BAGUS GDE DIDIT CITRA ANGGARANA, 5. NI LUH KETUT MARYATI, sebagai Para Termohon
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi Perkara	Sengketa Warisan (Adat Bali)
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali yang berhak mewaris tanah "Duwe Tengah" adalah ahli waris Purusa (ahli waris dari garis yang berstatus laki-laki).
Amar Putusan	Kabul PK
Alasan Menjadi Landmark Decision	Garis keturunan yang berstatus laki-laki dalam Hukum Waris Adat Bali adalah Purusa yang berhak mewaris tanah "duwe tengah". Sehingga perbuatan hukum dengan melakukan pendaftaran sebagian tanah adalah tidak dibolehkan sehingga terbitnya sertifikat tanah tidak mempunyai kekuatan secara hukum.

III. Putusan Nomor 3549 K/Pdt/2023

Nomor Perkara	3549 K/Pdt/2023
Para Pihak	PT. BERCA SCHINDLER LIFTS, sebagai Pemohon melawan SHARA AGUSTINA, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi Perkara	Wanprestasi
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H 3. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perjanjian kerja yang memuat klausula tidak boleh kerja di tempat lain dengan bidang yang sama selama waktu tertentu tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.
Amar Putusan	Kabul Kasasi
Alasan Menjadi Landmark Decision	Perjanjian Kerja terkait Rahasia Dagang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

AGAMA

I. Nomor 364 K/Ag/2023

Nomor Perkara	364 K/Ag/2023
Para Pihak	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (UNIT SYARIAH), Pemohon Kasasi; L a w a n GUNAWAN, Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 3. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.
Kaidah Hukum	Dalam hal prestasi yang harus dipenuhi hanya berupa pembayaran sejumlah uang dan nasabah mengalami kerugian nyata (*real loss*), Hakim dapat membebankan uang paksa (*dwangsom*) dengan menyimpangi ketentuan Pasal 611 Rv
Amar Putusan	Tolak Perbaikan
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penerapan norma dwangsom secara khusus dalam putusan penghukuman untuk membayar sejumlah uang.

II. Nomor 466 K/Ag/2024

Nomor Perkara	466 K/Ag/2024
Para Pihak	1. SALMA BINTI HAPSU, 2. AGUS HERU PRAYITNO BIN ENDIN BAKRI, 3. SAHAWI BIN HAPSU, 4. MUTIMA BINTI HAPSU, 5. SURYADI, S.Pd.I. BIN SURYO, 6. SUYONO BIN MA'WE, 7. MAMLUATUL HASANAH BINTI MOH. IMRON, MOH. DAVIF AKHTAR BIN MOH. IMRON; **Para Pemohon Kasasi;** **L a w a n** 1. SATUN BIN SAEN alias SAMI'AN, 2. ITA HALIWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, 3. IRA KURNIAWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, 4. RUSTINA QOMARIYAH BINTI H. SABRI; **Para Termohon Kasasi**; D a n: 1. ASTUTIK BINTI NIDIN; 2. SITI RA'ODA BINTI NIDIN; 3. YULIANA BINTI NIDIN; **Para Turut Termohon Kasasi**;
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Hukum Waris
Majelis Hakim	1. Dr. H. Purwosusilo, S.H, M.H. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	Prinsip *takharuj* dapat diterapkan dalam pembagian waris berdasarkan hibah pewaris dengan syarat budel waris yang dihibahkan kepada ahli waris belum diserahterimakan (*qabd*) sampai pewaris meninggal dunia.
Amar Putusan	Kabul Kasasi
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penegasan hibah kepada ahli waris yang belum diterima oleh ahli waris, menjadi dasar pembagian warisan.

MILITER

Nomor 141 K/Mil/2023

Nomor Perkara	Nomor 141 K/Mil/2023
Terdakwa	**Serma XY**
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Perbuatan cabul terhadap anak
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pelaksanaan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dapat menyimpangi ketentuan ancaman pidana penjara minimal dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak
Amar Putusan	Tolak Kasasi.
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penguatan peran serta Lembaga Masyarakat Adat guna mewujudkan pemulihan hubungan antara terdakwa, korban dan masyarakat.

TATA USAHA NEGARA

I. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Nomor Perkara	12 P/HUM/2024
Para Pihak	Eko Sentosa, sebagai Pemohon Melawan Presiden Republik Indonesia, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Hak Uji Materiil
Majelis Hakim	7. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 8. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 9. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD harus menggunakan metode *at cost* demi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis, efisien dan akuntabel.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil
Alasan Menjadi *Landmark Decision*	Penghapusan diskriminasi pertanggungjawaban sistem perjalanan dinas antara eksekutif dan legislatif.

II. Perkara Tindakan Faktual

Nomor Perkara	184 K/TUN/TF/2023 jo. 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Para Pihak	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sebagai Para Pemohon Kasasi Melawan Rahmawati Salam Sebagai Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Tindakan Faktual Sengketa Pertanahan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.; 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.; 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Asimah , S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Uang ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya disesuaikan dengan mengkonversi nilai harga emas saat ini, ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.
Amar Putusan	Tolak Kasasi
Alasan Menjadi *Landmark Desicion*	Perluasan makna nilai pembayaran ganti rugi dan kompensasi yang diatur dalam PP 43 Tahun 1991

III. Perkara Tindakan Faktual

Nomor Perkara	299 K/TUN/TF/2024
Para Pihak	1. Adhito Harinugroho; 2. Lilik Sulistyo; dan 3. Suci Fitriah Tanjung Sebagai Para Pemohon Kasasi Melawan 1. Presiden Republik Indonesia Sebagai Termohon Kasasi I; 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Sebagai Termohon Kasasi II; dan 3. Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) sebagai Turut Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Tindakan Faktual Sengketa TUN Lainnya
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.; 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.; 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti	A. Tirta Irawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	LSM yang peduli dalam pengkajian mengenai penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam sengketa tertentu (pengangkatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah) di peradilan tata usaha negara.
Amar Putusan	Tolak Perbaikan.
Alasan Menjadi *Landmark Decision*	Perluasan hak gugat bagi organisasi (LSM/NGO), perwakilan kelompok, dan warga negara dalam sengketa pengangkatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah di peradilan tata usaha negara.

Bab 6
Pengawasan

Program Pembaruan

Penguatan Audit Kinerja Berbasis Sistem Informasi

Pada Tahun 2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan Aaplikasi Wastitama (pengawasan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama) dengan menambahkan modul audit kinerja yang bertujuan untuk mempermudah Tim Audit Kinerja melakukan pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil Audit Kinerja dan mempermudah satuan kerja dalam melakukan tindak lanjut atas temuan audit kinerja tersebut dengan menyampaikan bukti tindaklanjut melalui Aplikasi Wastitama.

Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin keberhasilan Mahkamah Agung dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pencegahan, penguatan sistem pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah Badan Pengawasan sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung.

Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Ringkasan hasil evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Permintaan evaluasi dari Sekretaris MA RI kepada Tim Penilai Nasional dan Tim Penilai Internal (evaluasi mandiri) untuk mengevaluasi 259 (dua ratus lima puluh sembilan calon unit kerja berpredikat WBK.	259	Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3012/SEK/OT1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Hal Pengajuan Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Evaluasi Mandiri;
2	Unit kerja yang tidak memperoleh predikat WBK (evaluasi mandiri)		
	a. Unit kerja tidak memenuhi seleksi administratif	144	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2023, serta telah diumukan dalam Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administratif Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2024 dan Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1101/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Hasil Sanggah atas Seleksi Administratif Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2024 meluluskan 115 (seratus lima belas) atau 44,40% (empat puluh empat koma empat puluh persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya, yakni desk evaluation–analisis dokumen LKE dan data dukung.
	b. Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria desk evaluation–analisis dokumen LKE dan data dukung	75	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung serta telah diumumkan dalam Surat Pengumunan Tim Penilai Internal Nomor 1161/BP/PW.1.1.1/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian (Desk Evaluation)–Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integriotas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit kerja atau sebanyak 28,96% (dua puluh delapam koma sembilan puluh enam persen). Sisanya sebanyak 40 (empat puluh) atau 15,44% (lima belas koma empat puluh empat persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni desk evaluation–wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024.
	c. Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria desk evaluation–wawancara dan verifikasi lapangan	13	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria desk evaluation–wawancara dan verifikasi lapangan sebanyak 13 (tiga belas) atau 5,02% (lima koma nol dua persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.
	d. Unit kerja yang tidak lulus clearance	3	Unit kerja yang tidak lulus clearance dari KPK, BIN dan/atau ORI
3	Unit kerja yang memperoleh predikat WBK	24	Unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK sebanyak 24 (dua puluh empat) atau 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen ANTI Penyuapan (SMAP)

Pada tahun 2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung menunjuk 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja pelaksana SMAP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 14/BP/SK.PW1/II/2024 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) pada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditetapkan 16 (enam belas) pengadilan yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam penerapan SMAP lebih banyak daripada tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) pengadilan.

Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1.	Pengadilan Agama Banjarmasin	A	Pembangunan
2.	Pengadilan Agama Magelang	A	Pembangunan
3.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	B	Pembangunan
4.	Pengadilan Negeri Ambon	B	Pembangunan
5.	Pengadilan Negeri Semarang	B	Pembangunan
6.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	B	Pembangunan
7.	Pengadilan Negeri Pati	B	Pembangunan
8.	Pengadilan Negeri Klaten	B	Pembangunan
9.	Pengadilan Negeri Jambi	C	Pembangunan
10.	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	A	Evaluasi
11.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A	Evaluasi
12.	Pengadilan Agama Bantul	A	Evaluasi
13.	Pengadilan Negeri Wates	B	Evaluasi
14.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	B	Evaluasi
15.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	B	Evaluasi
16.	Pengadilan Negeri Gorontalo	C	Evaluasi

Sementara itu, sebelas satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan.

Rapat Koordinasi sistem Pengawas Bidang

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Bidang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 27--29 November 2024 dengan peserta 120 orang dari 60 satuan kerja pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan sewilayah hukum Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung yang diikuti oleh wakil ketua dan hakim pengawas bidang.

Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang memantau kedisiplinan aparatur di lingkungan kantor Mahkamah Agung, mengawasi ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dan aparatur pada Mahkamah Agung, serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan Tingkat Lanjut Investigasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)

Badan Pengawasan menyelenggarakan pelatihan tingkat lanjut investigasi bagi Satuan Pengawasan Khusus (Satwasus) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Siwas sebagai salah satu kanal pengaduan bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pengelolaan Sistem Pengawasan

Penanganan Pengaduan

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2024

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Masih dalam penyelesaian		172
2.	Selesai diproses		4.146
	a. Diperiksa Tim Bawas	211	
	b. Delegasi Pemeriksaan	91	
	c. Konfirmasi	220	
	d. Klarifikasi	1.063	
	e. Memorandum/delegasi internal	111	
	f. Surat jawaban	1.172	
	g. Pelaksanaan pemantauan	68	
	h. Pengarsipan	98	
	i. Gabung berkas	1.086	
	j. Pencabutan	26	
Jumlah			4.318

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 5 (lima) orang hakim.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang dikenaki sanksi/hukuman disipilin pada tahun 2024 sejumlah 244 orang.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2024.

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	31	13	65	109
	Hakim ad hoc	-	-	3	3
2.	Panitera	6	-	6	12
3.	Sekretaris	1	2	1	4
4.	Panitera muda	7	1	4	12
5.	Panitera pengganti	17	6	12	35
6.	Jurusita	8	2	8	18
7.	Jurusita pengganti	5	2	2	9
8.	Pejabat struktural	6	5	2	13
9.	Pejabat fungsional	1	1	2	4
10.	Pelaksana	12	9	3	24
11.	PPNPN	-	-	1	1
Jumlah		94	41	109	244

Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	121
2.	Panitera	17
3.	Sekretaris	-
4.	Panitera muda	12
5.	Panitera pengganti	14
6.	Jurusita	7
7.	Jurusita pengganti	2
8.	Pejabat struktural	-
9.	Staf	2
10.	Calon hakim	-
11.	PPNPN	4
Jumlah		179

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	25	25	18	12	80
Peradilan agama	21	28	24	9	82
Peradilan militer	3	-	-	-	3
Peradilan TUN	-	2	3	1	6
Total	49	55	45	22	171

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2024

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen peradilan	1.147	Program kerja, evaluasi kegiatan, dan standar pelayanan
2.	Administrasi persidangan	1.291	Persidangan, minutasi berkas perkara, berita acara sidang, dll.
3.	Administrasi perkara	1.151	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, keuangan perkara, PNBP, dll.
4.	Administrasi umum	1.843	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan *e-purchasing* menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, dll.
5.	Kinerja pelayanan publik	1.230	Penanganan pengaduan, keterbukaan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (posbakum), dan PTSP

Audit Kinerja

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	12	7	16	10	45
Peradilan agama	10	10	12	5	37
Peradilan TUN	-	1	-	-	1
Peradilan militer	-	1	-	-	1
Jumlah	22	19	28	15	84

Temuan Audit Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	545	436	0	9
2	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	229	163	3	12
3	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	153	173	0	5
Total		927	772	3	26

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No.	PERMENPAN RB No 88 Tahun 2021 SK SEKMA No. 878 Tahun 2022			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2022	2023
1.	>90--100	AA (Sangat Memuaskan)	-	-
2.	>80--90	A (Memuaskan)	5	5
3.	>70--80	BB (Sangat Baik)	62	63
4.	>60--70	B (Baik)	6	12
5.	>50--60	CC (Cukup/Memadai)	1	6
6.	>30--50	C (Kurang)	-	1
7.	0--30	D (Sangat Kurang)	-	-
Jumlah			**74**	**87**

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2024

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Reviu laporan keuangan dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut. a. Laporan Keuangan Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Januari 2024 b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Catatan: Laporan Keuangan MA RI tahun 2023 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Monitoring dan Evaluasi selama tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan.
2.	Reviu RKA K/L	Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2024. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas penyusunan pagu anggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu RKA K/L Tahun 2024 dilaksanakan 3 kali, yaitu sebagai berikut. a. Reviu RKA K/L Pagu Indikatif MA Tahun 2024 yang dilaksanakan bulan Maret 2024. b. Reviu RKA K/L Pagu Anggaran MA Tahun 2024 yang dilaksanakan bulan Juni 2024. c. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi MA Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.

No.	Kegiatan	Keterangan
3.	Reviu pelaksanaan anggaran PBJ	Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 91,95% dari rencana penyerapan dengan perincian sebagai berikut. Atas total realisasi sebesar Rp10.844.551.995.848,00 (90,95%) per 30 November 2024 tersebut dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana sampai dengan bulan November 2024 sebesar Rp11.924.242.498.000,00 Perbandingan rencana dan realisasi kontrak pengadaan barang/jasa tampak sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Total Pagu Alokasi Belanja	Rencana Penyerapan Dana (Rp)		Realisasi Penyerapan Dana (Rp)		Realisasi s.d. Triwulan IV Terhadap RPD s.d. Triwulan IV (%)
			s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5)*100
1	Belanja Pegawai	7.770.222.491.000,00	5.785.137.198.333,00	7.770.222.491.000,00	5.875.078.658.511,00	7.329.243.641.579,00	94,32
2	Belanja Barang	3.035.435.038.000,00	2.184.037.655.970,00	3.035.435.038.000,00	2.067.609.576.113,00	2.639.772.835.526,00	86,97
3	Belanja Modal	1.118.584.969.000,00	706.333.114.626,00	1.118.584.969.000,00	576.052.368.767,00	875.535.518.743,00	78,27
	Total	11.924.242.498.000,00	8.675.507.968.929,00	11.924.242.498.000,00	8.518.740.603.391,00	10.844.551.995.848,00	90,95

Perincian progres pembayaran kontrak kerja tampak sebagai berikut.

No	Metode	Selesai/ Sudah BAST		Realisasi Pembayaran	
		Paket	Nilai (Rp)	Paket	Nilai (Rp)
Belanja Barang					
1	Swakelola - Tipe I	53	6.036.062.264,00	55	6.163.437.264,00
2	Penyedia - E-Purchasing	183	75,214,419,887,00	270	230.560.171.618,00
3	Penyedia - Pengadaan Langsung	620	71,584,866,984,00	749	80.929.879.474,00
4	Penyedia - Penunjukan Langsung	89	13,927,329,357,00	100	16.388.560.257,00
5	Penyedia - Tender Cepat	35	27,837,233,692,00	40	31.760.58-0.489,00
6	Penyedia - Tender/Seleksi	41	38,052,449,416,00	56	113.780.004.725,00
7	Penyedia - Tender/Seleksi Dini	-	-	-	-
8	PBJ yang dikecualikan	13	11.958.351.000,00	13	11.958.351.000,00
Total Belanja Barang		**1,034**	**244,610,712,600,00**	**1283**	**491,540,984,827,00**
Belanja Modal					
1	Penyedia - E-Purchasing	98	51,444,022,837,00	100	51.853.162.837,00
2	Penyedia - Pengadaan Langsung	65	6,887,919,378,00	106	9.962.571.736,00
3	Penyedia - Penunjukan Langsung	12	22,592,534,933,00	25	39.774.381.977,00
4	Tender cepat	1	75,357,900,00	1	75.357.900,00
5	Penyedia - Tender/Seleksi	51	315,301,734,466,00	147	656.740.014.388,00
6	Penyedia - Tender/Seleksi Dini	-	-	-	-
Total Belanja Modal		**227**	**396,301,569,514,00**	**379**	**758,405,488,838,00**
Grand Total		**1,261**	**640,912,282,114.00**	**1,662**	**1,249,946,473,665.00**

No.	Kegiatan	Keterangan
		Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam reviu PA PBJ Triwulan IV adalah sebagai berikut. a. Belum disusun kebijakan internal secara menyeluruh untuk mendorong peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ditunjukan dengan laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punisment). b. Belum maksimalnya peng-input-an rencana umum pengadaan pada aplikasi SiRUP. c. Terdapat perencanaan pengadaan yang belum direalisasikan karena relaksasi kebijakan automatic adjusment baru dilaksanakan pada bulan September 2024. d. Penggunaan aplikasi e-Pandu masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan data tender dalam aplikasi LPSE. e. Tidak terdapat data perencanaan pengadaan dalam paket dan nilai serta terbatasnya alat monitoring realisasi belanja per paket dan nilai.
4.	Reviu revisi anggaran	Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yakni sebagai berikut. a. Reviu perubahan peruntukan Automatic Adjustment tahun 2024 pada BUA Mahkamah Agung RI Rp164.409.526.000,00 MA tahun 2024 yang dilaksanakan di bulan Agustus 2024. b. Reviu atas Permintaan Tambahan Anggaran Pembangunan Gedung Kantor PT TUN Palembang dan Pengadilan Negeri Banjar. c. Reviu terhadap usulan revisi Anggaran MA tahun 2024 terkait pembukaan blokir khusus pemenuhan kendaraan roda 2, penyesuaian RO dan pergeseran anggaran untuk memenuhi RO SBKU sautan kerja daerah serta pergesaran alokasi (optimalisasi alokasi) belanja modal pada satuan kerja daerah tahun 2024 yang dilaksanakan bulan November tahun 2024; d. Reviu tunggakan transpor hakim.
5.	Reviu RKBMN	Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun 2024 dilaksanakan 2 kali, yaitu sebagai berikut. a. Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) MA RI regeuler untuk tahun 2026 yang dilakukan pada bulan Agustus 2024. b. Revisi atas RKBMN MA RI tahun 2024 berupa pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang dilaksanakan pada bulan September 2024.
6.	Reviu atas penerimaan PNBP	Reviu atas penerimaan PNBP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNBP telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan, reviu atas penerimaan PNBP pada tahun 2024 dilaksanakan pada: a. bulan Februari 2024 untuk Tahun 2023; b. bulan April 2024 untuk Triwulan I Tahun 2024; c. bulan Juli 2024 untuk Triwulan II; dan d. bulan Oktober 2024 untuk Triwulan III.
7.	Reviu hibah	Reviu hibah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu untuk: a. Hibah Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 b. Hibah Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 c. Hibah Triwulan III yang dilaksanakan pada bulan November 2024; dan d. Hibah Insidentil (sesuai permohonan) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024

No.	Kegiatan	Keterangan
8.	Liaison officer (LO)	Liaison officer/pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI Sampai dengan semester II tahun 2024, Badan Pengawasan MA RI sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi Liaison Officer Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Mahkamah Agung di Wilayah DKI Jakarta, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 1/ST/V/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 selama 75 hari sampai dengan tanggal 13 Mei 2024. 2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan III 2024 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sesuai Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 159/ST/V/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 selama 80 hari sampai dengan tanggal 13 November 2024. 3. Pemeriksaan Interim atas laporan Keuangan Tahun 2024 pada Mahkamah Agung di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo sesuai dengan Surat Tugas BPK Nomor 199/ST/V/11/2024 tanggal 14 November 2024 selama 22 hari sampai dengan 8 Desember 2024 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 286/ST/V/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 selama 6 hari sampai dengan 15 Desember 2024.
9.	Probity audit	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait dengan pengadaan barang/jasa. Probity audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024 probity audit dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali penugasan pada 22 (dua puluh dua) satuan kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadilan Agama Bengkayang 2. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau 3. Pengadilan Tinggi Tata Negara Palembang 4. Pengadilan Agama Cimahi 5. Pengadilan Agama Banjar 6. Pengadilan Agama Kuningan 7. Pengadilan Agama Teluk Kuantan 8. Pengadilan Agama Ngamprah 9. Pengadilan Agama Tamiang Layang 10. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 11. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 12. Pengadilan Agama Temanggung 13. Pengadilan Agama Dataran Honipopu 14. PengadilanTinggi Sulawesi Barat 15. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 16. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan 17. Pengadilan Negeri Jakarta Utara 18. Pengadilan Negeri Paringin 19. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau 20. Pengadilan Agama Slawi 21. Pengadilan Agama Tanjung 22. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
10.	Audit PBJ	Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Audit PBJ dilaksanakan pada 1 (satu) satuan kerja yaitu pada Badan Urusan Administrasi untuk 2 (dua) Kegiatan.

No.	Kegiatan	Keterangan
11.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Penjaminan kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/ informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI. Hasil Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut. a) Nilai untuk maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3.498 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). b) Nilai untuk manajemen risiko indeks (MRI) adalah 3.691 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3 (terdefinisi). c) Nilai untuk Indeks efektivtas pengendalian korupsi (IEPK) adalah 3.126.
12.	Pemeriksaan Keuangan (PNBP dan Hibah)	Pemeriksaan keuangan dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP dan hibah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan keuangan dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) penugasan pada 11 satuan kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Pengadilan Agama Cibinong 3. Pengadilan Agama Indramayu 4. Pengadilan Agama Surabaya 5. Pengadilan Agama Sumber 6. Pengadilan Agama Soreang 7. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 8. Pengadilan Agama Jember 9. Pengadilan Negeri Surabaya 10. Pengadilan Agama Bekasi 11. Pengadilan Agama Jakarta Barat
13.	Evaluasi IACM	Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik IACM dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut. a. Update Evidence I dilaksanakan pada bulan April 2024 b. Update Evidence II dilaksanakan pada bulan April 2024 c. Penilaian IACM III dilaksanakan pada bulan Juni 2024 d. Quality Assurance BPKP dllaksanakan pada bulan Desember 2024

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.102 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 99,98%.

Bab 7
Peran Serta dan Kerja Sama

Kerja Sama Multilateral

Council of Asean Chief Justices

Pertemuan ke-11 Council of ASEAN Chief Justices

Pertemuan *Council of Asean Chief Justice* (CACJ) ke-11 diselenggarakan pada 19--20 November 2024 di Cebu, Filipina, dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara Asean terdiri atas delapan Ketua Mahkamah Agung Asean yang hadir langsung dan dua perwakilan.

Kehadiran pada Rapat Kelompok Kerja CACJ

Atas undangan Sekretariat CACJ, Mahkamah Agung RI menghadiri rapat 4 (empat) kelompok kerja sebagai beriku.

1. *Future Works of CACJ*
2. *Cross-Border Disputes Involving Children*
3. *Asean Judiciary Portal*
4. *CACJ Working Group on the Conduct of Videoconferencing Hearings*

Kegiatan Sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education And Training

Sebagai co-chair, Mahkamah Agung RI bersama dengan Philipines Judicial Academy (Philja) melakukan perencanaan strategis dan melaksanakan berbagai agenda kunci kelompok kerja pendidikan dan pelatihan yudisial (working group judicial education and training (WG-JET).

Survey on Climate Change Adjudication

Bekerja sama dengan *International Development Legal Organization (IDLO)* pada Agustus 2024, Mahkamah Agung RI melaksanakan survei tentang pengembangan Modul *E-Learning* tentang Adjudikasi Perubahan Iklim untuk meningkatkan kinerja *WG-JET* di bidang hukum lingkungan.

Regional Workshop On Consumer Protection And Working Group On Judicial Education & Training (WG-JET) Meeting

Bekerja sama dengan *the Consumer Protection in Asean II (Protect II)* Project *by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH Indonesia, Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Lokakarya Pelindungan Konsumen pada 22--23 Februari 2024 untuk mengembangkan modul *e-learning* yang sedianya akan diunggah pada *Platform E-Learning CACJ*.

Judicial Knowledge Exchange On Cybercrime

Dalam kapasitas sebagai *Co-Chair WG JET*, Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *Philippines Judicial Academy*, yang bekerja sama dengan *Council of Europe* dan proyek Octopus di bawah *Global Action against Cybercrime* (GLACY) untuk menghadiri Acara Pertukaran Pengetahuan Asean tentang Kejahatan Dunia Maya pada tanggal 1-3 Oktober 2024 di Akademi Peradilan Filipina.

Kunjungan Persahabatan Dari Peradilan Negara Sahabat

Kunjungan 8 Delegasi Negara Sahabat Pada Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum Dan Peradilan

Kampus Mahkamah Agung *Corporate University* menerima kehormatan pada kegiatan penanaman pohon oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersama para Ketua Mahkamah Agung dan delegasi negara sahabat pada Selasa, 20 Februari 2024. Penanaman pohon yang merupakan bagian dari rangkaian event Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023.

Kunjungan Delegasi Peradilan Cina pada 2024

Sepanjang 2024 tercatat 5 (lima) delegasi peradilan Cina yang mengunjungi Mahkamah Agung RI.

Kerja Sama Yudisial Bilateral

Opening Legal Year Malaysia 2024

Wakil Ketua Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H. didampingi oleh Ketua Kamar Pengawasan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H. dan hakim yustisial Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. memenuhi undangan *Federal Court of* Malaysia untuk menghadiri acara "*Opening Legal Year 2024*" Mahkamah Agung Malaysia pada tanggal 15 Januari 2024 yang diselenggarakan di Putrajaya *International Convention Centre* (PPIC).

Opening Legal Year Singapura 2024

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Senin 8 Januari 2024 memenuhi undangan *Supreme Court of Singapore* menghadiri acara *Opening Legal Year* Singapura 2024.

Penandatangan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Presiden *Hoge Raad* Kerajaan Belanda Prof. Mr. G. (Dineke) de Groot kembali menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial pada 20 Januari 2024, setelah nota kesepahaman sebelumnya berakhir 31 Desember 2023.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Superior Tribunal de Justica Brazil

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Rabu 21 Agustus 2024 jam 13.00 waktu Brazil menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan *National High Court of Brazil (Superior Tribunal de Justiça-STJ) di* Brasilia. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan President Maria Thereza De Assis Moura, Presiden *National High Court of Brazil (STJ)* dan Antonio Herman Benjamin Presiden Terpilih *National High Court of Brazil (STJ)* yang mewakili STJ.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Supremo Tribunal de Justiça (Mahkamah Agung Portugal) sekaligus Studi untuk Penerapan KUHP Nasional dan Transisi Pengadilan Pajak

Pada 23–27 September 2024 delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kunjungan studi ke Portugal dengan agenda utama penandatanganan nota kesepahaman dengan *Supremo Tribunal de Justiça* (Mahkamah Agung Portugal).

Kehadiran pada Forum Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Syarifuddin, S.H., M.H. pada 21 Juni 2024 pagi waktu setempat atas undangan *Chief Justice* William Alstergren memberikan pidato kehormatan di depan Forum *Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diselenggarakan di* Newcastle, Sydney.

Kunjungan Kerja Yudisial ke Amerika Serikat Februari 2024

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2024 dan melakukan dialog dan kunjungan kepada berbagai instansi pendidikan dan peradilan di Amerika Serikut.

Kunjungan Studi untuk Penyusunan Kebijakan untuk Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara ke Institusi Hukum dan Peradilan di Amerika Serikat

Difasilitasi oleh United States Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (US OPDAT), delegasi Mahkamah Agung melakukan kunjungan studi ke Amerika Serikat guna mempelajari praktik pencegahan konflik kepentingan dalam sistem peradilan federal dan negara bagian di Amerika Serikat.

Kunjungan Kerja ke Ministry of Justice United Kingdom Untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Hukum Ekonomi

Delegasi Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam kunjungan kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Ekonomi ke London pada tanggal 16--19 September 2024.

Kunjungan Studi ke Australia untuk Optimalisasi Penanganan Perkara Terorisme

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Australia pada 30 November hingga 7 Desember 2024 dengan tujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam penanganan perkara terorisme, termasuk pemidanaan, pemulihan korban, dan kebijakan pendukung sistem peradilan di negara bagian New South Wales, Victoria, serta High Court di Canberra.

Kunjungan kerja ke Badan Peradilan dan Perguruan Tinggi Belanda untuk Transformasi Pengadilan Pajak

Pada tanggal 9 – 11 Desember 2024, delegasi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Pajak Indonesia, difasilitasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute (VVI) Leiden University, melakukan kunjungan ke Belanda terkait upaya transformasi dan reformasi pengadilan pajak di Indonesia.

Kerjasama Nasional

Kerjasama dengan Universitas Indonesia

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Pustrajak Kumdil MA RI) melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada 26 Januari 2024, bertempat di Ruang Rapat FH UI di kota Depok

Kerjasama dengan BRIN

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada 8 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat BRIN

Kerjasama dengan Universitas Islam As-Syafi'iyah

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, 30 April 2024 di Kampus Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta

MoU Badilag dengan IAIN Kudus

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R menandatangani *Memorandum Of Understanding* (Mou) dengan IAIN Kudus dan Fakultas Syari'ah IAIN Kudus pada 07 Mei 2024

Kerjasama dengan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, pada Senin, 20 Mei 2024 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung.

Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri melakukan penandatanganan Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada hari Rabu, 17 Juli 2024 bertempat di Lt.12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Kerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI menjalin kerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung, pada tanggal 24 Juli 2024, di ruang *Executive Lounge* Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Jawa Barat

Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) dan Mahkamah Agung RI memperkuat kerja sama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 12 Agustus 2024 di Ruang Rektor Unhas

Kerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

UIN Sunan Gunung Djati Bandung menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) dengan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) pada hari Senin, 12 Agustus 2024 di di Badilag Comand Center, lantai 6 Gedung Badan Peradilan Agama di Jakarta, serta Nota Kerjasama (*Memorandum Of Agreement*) pada hjari Kamis, 31 Oktober 2024 di Aula Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati.

Kerjasama dengan Universitas Brawijaya

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Penandatanganan Kerjasama dengan Universitas Brawijaya pada tanggal 17 Oktober 2024 di ruang Auditorium Rektorat Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur

Kerjasama dengan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tentang Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat **dan** *Memorandum Of Agreement (Moa)* dengan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, pada hari Jum'at, 29 November 2024 di Badilag Comand Center, lantai 6 Gedung Badan Peradilan Agama di Jakarta

Kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo serta Nota Kerjasama (*Memorandum Of Agreement*) dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Jum'at, 29 November 2024 di Badilag Comand Center, lantai 6 Gedung Badan Peradilan Agama di Jakarta.

Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada hari Senin, 16 Desember 2024 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Buktitinggi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Buktitinggi pada hari Senin, 16 Desember 2024 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang

Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Selasa, 17 Desember 2024 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang

Penyelenggaraan Acara Internasional

Rapat Kerja dan Kunjungan Tim Model Forest Act Initiative (MoFAI)

BSDK MA RI menjadi tuan rumah atas rapat kerja Tim *Model of Forest Act Initiative* (MoFAI) yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, pada 27 – 29 Juli 2024.

Pelatihan Masterclass untuk Hakim Komersial di Asia Pasifik Kerjasama Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung Singapura

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura, yang ditanda tangani November 2023 yang lalu, BSDK MARI dan Singapore Judicial College bekerjasama melaksanakan Masterclass Training for Asia Pacific Judges, di BSDK MARI Ciawi pada tanggal 9-12 September 2024. Pelatihan Masterclass ini diikuti oleh 64 Hakim Senior dari tidak kurang 14 negara, yang terdiri dari Indonesia, Brunei, Australia, New Zealand, Vietnam, Queensland, Singapura, Republik Rakyat China, Bahrain, Kamboja, Filipina, India, Hongkong SAR, Malaysia, dan Pakistan.

The Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication

Pada 2-6 Desember 2024, BSDK Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan *Client Earth* dan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menyelenggarakan lokakarya *The Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication* bertempat di Mahkamah Agung *Corporate University*, Mega Mendung, Bogor.

Kerja Sama dengan Mitra Pembangunan

Kerjasama Mahkamah Agung Ri Dengan OPDAT (Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance And Training) dalam rangka Tindak Pidana Terorisme

USDOJ-OPDAT bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme bagi Hakim Peradilan Umum pada tanggal 3 s.d. 12 Januari 2024 di Bandung, Jawa Barat.

Lokakarya Hukum Lingkungan Dan Litigasi Perubahan Iklim Bekerjasama Dengan International Development Law Organization (IDLO)

Melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI kembali bekerjasama dengan IDLO dalam menyelenggarakan Lokakarya Hukum Lingkungan dan Litigasi Perubahan Iklim di Hotel Le Meridien Jakarta pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024.

Kerjasama Mahkamah Agung RI Dengan Australia Indonesia Partnership Of Justice 2 (AIPJ 2)

Kerjasama Berkelanjutan

Sepanjang 2024 AIPJ2 memberikan bantuan teknis bagi Mahkamah Agung melalui kemitraan antara Mahkamah Agung dengan sektor publik pada berbagai area pembaruan seperti Kantor Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MARI,Kelompok kerja Kemudahan Berusaha, Kelompok kerja Akses Terhadap keadilan, yang meliputi Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan 2024, asistensi teknis dalam kemudahan berusaha, termasuk diantaranya, asistensi untuk Peningkatan Daya Saing Nasional, Business Ready Survey serta proses evaluasi cetak biru pembaruan peradilan.

Training of Trainer (ToT) TIndak Pidana di Bidang Perpajakan

Bekerjasama dengan *Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2)* dan Prospera yang keduanya merupakan program kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan *Training Of Trainer* (ToT) Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan bagi Hakim Peradilan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s.d. 3 Agustus 2024 bertempat di Hotel Avenzel, Cibubur yang dihadiri 19 orang Hakim.

Kerjasama Mahkamah Agung RI Dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Penandatanganan Minutes of Meeting Bersama antara MARI, Kementerian Hukum dan HAM dan JICA

YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maarif, S.H., LLM., Ph.D bersama perwakilan dari *Japan international Cooperation Agency (JICA)*, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menandatangani *minutes of meeting (MoM)* pada Senin, 16 Desember 2024 di Jakarta.

Kerjasama Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual

Kegiatan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dalam bentuk Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual bagi Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang dengan pelaksanaan di Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2024 s.d. 8 Maret 2024, diikuti oleh 30 orang peserta.

Kerjasama dengan American Bar Association-Rule of Law Initiative

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan ABA ROLI pada 2024 adalah penyelenggaraan rapat Pokja Perempuan dan Anak, bersama-sama dengan AIPJ2, serta penyusunan kertas kebijakan tentang penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam perkara-perkara kekerasan seksual untuk hakim-hakim di lingkungan peradilan umum.

Training on programme Cybercrime Electronic Evidence Prosecutor Kerjasama Mahkamah Agung Ri Dengan Council Of Europe

Council of Europe memfasilitasi pelatihan bagi Hakim dan Jaksa bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan *Training on programme Cybercrime Electronic Evidence Prosecutor* yang dilaksanakan secara bertahap, dengan mengundang Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari 4 Lingkungan Peradilan berjumlah 25 orang dan Jaksa 10 orang. Pelatihan ini dilaksanakan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, tahap 1 pada tanggal 28 Oktober s.d 1 November 2024 dan Tahap 2 pada tanggal 24 s.d 29 November 2024.

Partisipasi pada Forum Internasional

Partisipasi Aktif Perdana Mahkamah Agung RI dalam Commission on the Status of the Women ke-68: Pemajuan Kepemimpinan Perempuan di Bidang Peradilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia ikut serta dalam Sidang Pendamping Tingkat Tinggi pada Sesi Tahunan ke-68 Commission on the Status of Women (CSW #68) dalam rangka mendukung pemberdayaan perempuan di peradilan internasional. Acara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 11-13 Maret 2024.

5th Judicial Insolvency Network di Singapura

YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung YM Dr. Nani Indrawati SH.,MH. dan Kepala BSDK MARI Bambang Hery Mulyono SH., MH menghadiri pertemuan *5th Judicial Insolvency Network* yang diselenggarakan di Singapura 12 dan 13 Juni 2024.

5th Standing International Forum for Commercial Court (SIFoCC) di Doha

Mahkamah Agung RI menghadiri *Full 5th Meeting Standing International Forum for Commercial Court (SIFoCC)* di Doha, Qatar pada tanggal 20-21 April 2024 yang diikuti oleh tidak kurang 172 peserta dari 57 negara dan keanggotaannya meliputi 2/3 dari negara G20.

4th Judicial Roundtable on Commercial Law, Durham Law School, Durham University,

Hakim Agung YM Syamsul Maarif hadir mewakili Mahkamah Agung RI dan didampingi oleh Staf Khusus Ketua MARI Aria Suyudi pada kegiatan *4th Judicial Roundtable on Commercial Law* diadakan di *Durham law School*, *Durham University* 23-26 April 2024.

Forum for Asian Insolvency Reform, di Singapora 26- 27 September 2024

Atas undangan dari Insol International Mahkamah Agung menghadiri Forum Reformasi Kepailitan Asia (*Forum for Asian Insolvency Reform*) di Singapura pada 26-27 September 2024.

19th Asia Pacific Chief Justice Meeting di Kuala Lumpur

Mahkamah Agung Republik Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi ke-19 Ketua Mahkamah Agung Asia dan Pasifik, yang berlangsung pada 11-14 Oktober 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Regional Conference on "Achieving Just Societies: Inclusive Justice Pathways for People and Planet in Asia and the Pacific-United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok

Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri Regional Conference on *"Achieving Just Societies: Inclusive Justice Pathways for People and Planet in Asia and the Pacific"* yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) Bangkok bekerjasama dengan beberapa organisasi regional, pada 11-13 November 2024 di Bangkok, Thailand.

10th Asian Pacific Mediation Forum Conference- United Nation Environment Programme di Port Moresby. Papua New Guinea

Atas undangan dari *Papua New Guinea for Judicial Excellence Supreme and National Courts of Justice*, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang H. Mulyono, secara resmi menghadiri Forum Mediasi Asia Pasifik ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2024 di Port Moresby, Papua Nugini.

Regional Judicial Dialogue on Environmental Rules of Procedure The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) di Bangkok, Thailand

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menghadiri undangan dari *The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI)* dalam kegiatan *Regional Judicial Dialogue on Environmental Rules of Procedure* yang dilaksanakan pada tanggal 26–27 September 2024 di *Judicial Training Center*, Bangkok, Thailand.

11th International Organization for Judicial Training International Conference, Sono Calm Goyang, Korea Selatan

Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tampil sebagai pembicara pada Konferensi Internasional ke-11 tentang Pelatihan Peradilan bertajuk *"Judicial Education at a Crossroads: Preparing for the Future of the Judiciary, Embracing Human Rights, Technology, and Effective Pedagogy"*. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 hingga 7 November 2024 di Sono Calm Goyang, Republik Korea Selatan.

Pelatihan Forced Labour Human Trafficking pada International Law Enforcement Academy (ILEA)

2 delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti Pelatihan Forced Labour Human Trafficking pada International Law Enforcement Academy (ILEA) yang berlangsung dari tanggal 4- 8 November 2024 di Kampus *International Law Enforcement Academy (ILEA)*, Bangkok.

Lokakarya Internasional Tentang Aturan Hukum Lingkungan Dalam Transisi Dan Pembangunan Hijau

Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan diundang sebagai pembicara pada Pelatihan Hakim Nasional Tiongkok dan Lokakarya Internasional tentang Aturan Hukum Lingkungan Dalam Transisi Dan Pembangunan Hijau yang diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan *ClientEarth* pada tanggal 5 s.d 8 November 2024 di Beijing dan Chengdu, Tiongkok. Pada Pelatihan Hakim Nasional dan Lokakarya ini dihadiri juga oleh 2 orang Hakim Indonesia Frensita Kesuma Twinsani dan Ferdian Permadi sebagai peserta.

6th Forum China-ASEAN Legal Cooperation di Chongqing

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, beserta Hakim Agung lainnya, menghadiri *Forum China-ASEAN Legal Cooperation* ke-6 di Chongqing, Tiongkok, pada 11-13 November 2024. Forum ini merupakan upaya untuk memfasilitasi kerjasama hukum antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, dengan perhatian pada pembangunan bersama, supremasi hukum, dan Inisiatif *Belt and Road* (BRI).

UN Climate Change Conference - COP29 Baku Azerbaijan 2024

Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI Bambang Hery Mulyono, menghadiri undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari Presiden Global *Judicial Institute on Environment* dalam acara Konferensi para pihak ke-29 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP 29) pada tanggal 14 s.d 22 November 2024 bertempat di Kota Baku, Azerbaijan.

Training Course On Diversified Commercial Dispute Settlement Mechanism In Belt And Road Region Countries, Chongqing, Tiongkok

Atas undangan dari *Southwest University of Political Science & Law (SWUPL)*, Mahkamah Agung RI mengirimkan 2 (dua) orang Hakim untuk mengikuti acara *Training Course on Diversified Commercial Dispute Settlement Mechanism in Belt and Road Region Countries.* Acara berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 Desember 2024. Mahkamah Agung mengirimkan Yusuf Pranowo, SH., MH (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Budi Hermanto, SH., MH (Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor).

Ringkasan Eksekutif **Laporan Tahunan 2024**

Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas

Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id